

SKRIPSI

PROSPEK *NEW STRATEGIC ARMS REDUCTION TREATY* DALAM KEPEMILIKAN SENJATA NUKLIR AMERIKA SERIKAT DAN RUSIA



ARGA PROBOWISESA

E131 07 056

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui arti penting perjanjian New START bagi Amerika Serikat dan Rusia. Setelah mengetahui arti pentingnya, melalui penelitian ini diharapkan akan diketahui peluang dan tantangan implementasi New START bagi Amerika Serikat dan Rusia di masa depan. Dari beberapa rumusan yang diambil maka penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode prediktif analitik. Dalam penelitian ini, akan diberikan gambaran umum nuklir di Amerika Serikat dan Rusia sebelum akhirnya prediksi bagaimana penerapan New START kepada keberadaan nuklir di Amerika Serikat dan Rusia. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penandatanganan perjanjian New START adalah implementasi kebijakan luar negeri, terkait nuklir kedua negara untuk bersama-sama mengurangi ancaman nuklir dari pihak-pihak non-pemerintah, seperti teroris. Perjanjian ini juga menjadi pintu bagi kedua negara untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan nuklir masing-masing demi modernisasi pertahanan mereka. Perjanjian New START bukanlah perjanjian pertama yang membatasi dan mengurangi persenjataan kedua negara. Hal ini terkait jumlah senjata nuklir yang masif di kedua negara. Jumlah nuklir yang melebihi kebutuhan memberikan dampak negatif dari segi ekonomi, khususnya biaya perawatan dan efisiensi pertahanan suatu negara. Kondisi-kondisi inilah yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perjanjian ini.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Rusia, Nuklir, Diplomasi, Pengendalian Senjata, Dilema Keamanan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to know the important of New START Agreement for United States and Russia. Afterward, the research will help finding opportunity and challenge of New START implementation for the future of both country. The research method is using predictive analytic. This research will give general image of nuclear posture in US and Russia, then predict the implementation of New START to existence of nuclear on this two country. Data collecting were obtained through library research by gathering data from written literatures of the problems and then analyze it. The literatures were books, documents, journals, and internet websites and online reports of the study to perused. All datas will be qualitatively analyzed. The result of this research shows that the signing of this agreement is a forerign policy implementation by these two country, related to their nuclear for further reduction of non-government's nuclear security threats, such as terrorist group. The agreement will become the entry point for both country learn each other nuclear power strength and weakness in order to modernize their defences. New START Agreement not their first treaty for arms ceiling and reduction. This related to their massive nuclear proprietary. The number of their nuclear exceeding their needs impacted negatively on their defense economies, especially maintenance cost and defense efficiency. These conditions have become the challenge as well as the opportunity for this agreement.

Keyword: United States, Russia, Nuclear, Diplomacy, Arms Control, Security Dilemma.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimulai dari sebuah pemikiran para ilmuwan Yunani Kuno, Democritus menganggap bahwa setiap benda di dunia terdiri atas partikel tidak kasat mata yang disebut atom. Atom adalah apa yang terjadi ketika sebuah benda terus-menerus dipotong hingga akhirnya sampai pada titik tidak dapat dipotong lagi.¹ Atom berasal dari kata *atomos*, yang dalam bahasa Yunani berarti “yang tidak dapat dibagi”. Atom kemudian menjadi bahan penelitian dan cabang ilmu fisika, hingga akhirnya menjadi sumber energi raksasa, salah satu senjata pemusnah massal, dan alat diplomasi.²

Abad ke-18 dan ke-19 merupakan masa ketika berbagai penelitian terkait atom dan nuklir mengalami perkembangan yang pesat. *Pitchblende*, bijih uranium pertama ditemukan oleh Pierre Curie dan Maria-Slodowska Curie pada tahun 1898, yang kemudian mereka namakan *radium*. Kemudian pada tahun 1904 Ernest Rutherford, Bapak Ilmu Nuklir yang berhasil menemukan bentuk fisik nuklir mengungkapkan, “*If it were ever possible to control at will the rate of disintegration of the radio elements, an enormous amount of energy could be obtained from a small amount of matter*”.³

J. J. Thompson pada tahun 1897 menemukan bahwa dalam atom terdapat proton positif (*positively-charged protons*) yang dikelilingi oleh proton negatif (*negatively-charged protons*). Proton positif inilah yang oleh Ernest Rutherford berhasil diidentifikasi sebagai nukleus atau pusat inti atom pada tahun 1908. James Chadwick kemudian menemukan pada

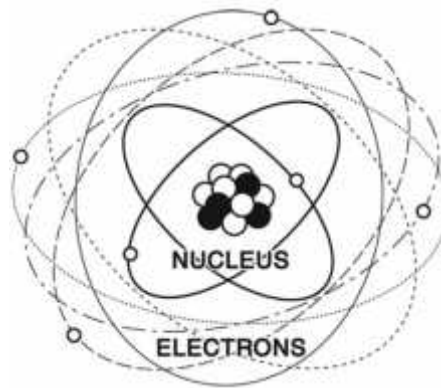
¹ Joseph Crincione, *Bomb Scare The History and Future of Nuclear Weapons*, New York: Columbia University Press. 2007, hal. 5.

² U.S. Department of Energy, *The History of Nuclear Energy*, Office of Nuclear Energy, Science and Technology: Washington D.C., Hal. 3, lihat juga Michael G. Roskin, Nicholas O. Berry, *The New World Of International Relations*, New Jersey: Prentice Hall. 1997, hal. 217.

³ *Ibid.*, hal. 3.

tahun 1932 bahwa dalam atom terdapat partikel yang memiliki berat yang sama dengan proton pada nukleus, namun tanpa aliran listrik (positif atau negatif). Partikel ini diberi nama proton, yang kemudian menjadikan model atom seperti yang dikenal sekarang.⁴

Gambar 1.1 Model Atom



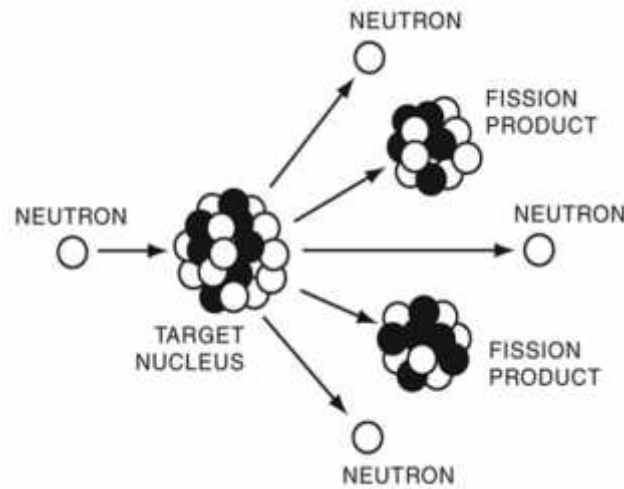
(sumber: *Bomb Scare; The History of Future of Nuclear*)

Otto Hahn, Fritz Strassman, dan Lise Meitner pada tahun 1939 membombardir uranium dengan neutron dan mendapati bahwa elemen baru telah tercipta. Uranium memiliki nomor atom 92, yang berarti terdapat 92 proton dalam nukleusnya. Para ilmuwan menganggap neutron-neturon tersebut diserap oleh atom-atom uranium dan inilah yang menghasilkan elemen baru ciptaan manusia. Analisis kimia sayangnya berkata lain bahwa yang terjadi bukanlah seperti itu. Ketika Lise Meitner dan Otto Freisch menggunakan teori Niels Bohr diketahui bahwa nukleus sebenarnya merenggang sebelum akhirnya menjadi dua nukleus. Freisch kemudian menamakan proses ini sebagai *fission*.⁵

⁴Joseph Cirincione, *Loc.Cit.*

⁵*Ibid.*

Gambar 1.2 Proses *Fission*



(sumber: *Bomb Scare; The History of Future of Nuclear*)

Penelitian lebih lanjut menunjukkan atom-atom hasil dari *fission* ternyata memiliki berat yang hampir sama. Itu berarti selama proses pemecahan energi yang terpecah memiliki berat dan kekuatan yang sama, sehingga ketika ini terjadi dalam proses berantai maka akan didapatkan ledakan energi yang terus menggandakan diri dalam jumlah yang besar. Melalui rumus yang kemudian ditemukan oleh Einstein diketahui jika suatu benda (m) dikalikan kecepatan cahaya dalam kuadrat (c^2) akan menghasilkan jumlah energi yang besar (E) atau $E=mc^2$. Menggunakan rumus Einstein kita dapat gambaran bahwa satu kilogram uranium akan menghasilkan 2.580.000.000.000.000.000.000 (2,58 triliun triliun) atom uranium setara dengan 10.000 ton dinamit.⁶

Nuklir akhirnya menjadi senjata pertama kali melalui proyek bernama *Manhattan Project* di Chicago. Proyek ini menghasilkan senjata nuklir pertama berjenis bom plutonium yang kemudian digunakan dalam serangan ke Hiroshima dan Nagasaki pada masa Perang Dunia II.⁷ Pasca Perang Dunia II, Perang Dingin antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan Uni Soviet pun dimulai. Dalam Perang Dingin, kepemilikan teknologi nuklir adalah faktor penting bagi dua negara *superpower* saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ini

⁶*Ibid.*, hal. 5-6.

⁷*Ibid.*, hal. 3 dan 7.

dimulai dari strategi nuklir kedua negara yang serupa yaitu *strategic outlook* atau strategi yang menekankan pentingnya pertahanan militer sebuah negara dalam mencapai dan menjaga kedaulatan mereka akibat kurang kuatnya institusi atau sistem internasional, yaitu dengan terus mengamati kekuatan negara lawannya.⁸

Bagi Amerika Serikat saat itu terdapat dua hal utama dalam strategi kepemilikan nuklir. Pertama adalah superioritas dalam kepemilikan nuklir, mengingat kemampuan dan daya hancur senjata ini. Kedua adalah untuk menjadikan nuklir sebagai sebuah pilihan serangan. Sementara Uni Soviet hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjadikan nuklir sebagai sebuah *counterforce* atau kekuatan serangan balasan dan alat pertahanan. Tujuannya adalah dengan menghancurkan kemampuan militer dan menjatuhkan semangat musuh. Hal ini akan lebih mudah dijelaskan jika melihat gaya kedua negara dalam mempersiapkan senjata nuklirnya. Amerika Serikat memilih menggunakan cara taktis, dengan lebih banyak memasang nuklir yang bisa diangkut pesawat. Sementara Rusia memilih memasang nuklirnya pada roket-roket besar di atas tanah dengan targetnya titik vital musuh, sambil menunggu serangan pertama.⁹

Alasan kepemilikan nuklir kemudian berkembang bahwa dengan memiliki nuklir, kedua negara tersebut memperkuat posisi mereka sebagai negara yang menjadi poros utama bagi negara lain dalam penetapan dan penerapan kebijakan luar negeri mereka. Konsep yang diterapkan pasukan Sekutu misalnya, A memiliki akses ke B jika A berpartisipasi dalam kebijakan B. Selain itu adalah kemampuan untuk menolak serangan negara lain dan menciptakan persekutuan dibawah kepemimpinan negara nuklir, dan yang paling penting

⁸ P. Edward Haley, David M. Keithley, and Jack Merritt, *Nuclear Strategy, Arms Control, and The Future*, Colorado: Westview Press, Inc., 1985, hal. 2-9.

⁹*Ibid.*, hal. 2-9.

adalah akses ke berbagai perjanjian dan kerjasama internasional dan peningkatan harga diri bangsa dan negara di lingkungan internasional.¹⁰

Contoh nyata misalnya pada Inggris yang mengembangkan kemampuan nuklirnya sendiri. Meskipun kemampuan nuklir Inggris sangat kecil dan tidak akan mampu menangkal Uni Soviet, namun Inggris menemukan tiga keuntungan politis ketika memiliki nuklir. Pertama, Inggris memiliki kepercayaan diri lebih dan prestise dibanding negara lain; kedua, Inggris mendapatkan reputasi sebagai sebuah negara kuat; dan ketiga, Inggris akan memiliki akses ke berbagai perjanjian khusus pemilik kemampuan nuklir dan ikut memiliki pengaruh dalam setiap kebijakannya.¹¹

Kondisi yang sulit ditebak selama masa Perang Dingin, rasa tidak aman yang muncul akibat kemampuan militer, ekonomi, atau teknologi negara lain (*security dilemma*)¹² mendorong negara-negara lemah atau yang baru merdeka mencari perlindungan kepada negara-negara kuat, dalam hal ini adalah mereka yang memiliki kekuatan nuklir. Ditambah lagi terdapat beberapa perang di negara lain yang secara tidak langsung melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet mendorong terjadinya *arms race* atau perlombaan senjata khususnya pada pengayaan nuklir. Akibatnya, pengembangan besar-besaran kekuatan nuklir bagi persenjataan mencapai puncaknya pada tahun 60-an. Kemudian dikenallah rudal balistik, rudal lintas benua, kapal selam pembawa nuklir, pesawat pembom nuklir, dan *silo* atau bunker penyimpanan nuklir.

Perang Dingin dinyatakan berakhir pada tahun 1990, tepatnya saat Uni Soviet pecah, namun kepemilikan teknologi perang, jumlah persenjataan, termasuk hulu ledak nuklir masih

¹⁰ Michael G. Roskin, Nicholas O. Berry, *The New World Of International Relations*, New Jersey: Prentice Hall, 1997, hal. 219.

¹¹ *Ibid.*, hal. 219.

¹² Martin Griffiths, *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction*, New York: Routledge, 2007, hal. 17.

berada di tingkat yang tinggi. Sekitar 10.000 hulu ledak dimasing-masing pihak.¹³ Ditambah lagi dengan berbagai jenis kendaraan dan rudal yang mampu mengangkut senjata ini ke berbagai belahan dunia. Mulai dari rudal balistik antar-benua, rudal balistik jarak menengah, kapal selam nuklir, pesawat pembom, atau mobil angkut. Hal inilah yang tetap memanaskan kondisi politik dunia, khususnya dalam bidang keamanan. Meskipun ada keraguan bahwa kedua negara ini akan menggunakan nuklir sebagai senjata, namun kepemilikannya tetap meresahkan sejumlah kalangan dan negara.

Akhir dari Perang Dingin menghasilkan lima negara pemilik nuklir yang resmi dan diakui secara internasional. Mereka adalah Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Perancis. Tujuannya agar nuklir, khususnya sebagai senjata, tidak menjadi milik satu kelompok saja sehingga *balance of power* tetap tercipta. Kelima negara ini akan berperan sebagai aktor yang memiliki pengaruh lebih dalam berbagai kebijakan penggunaan nuklir. Selain negara-negara yang telah mendapat persetujuan dari lima negara pemilik nuklir, terdapat beberapa negara yang hak dan kepemilikan nuklirnya terus dipertanyakan. Misalnya saja Israel, Pakistan, India, Korea Utara, dan Iran.¹⁴

Memahami tingginya jumlah hulu ledak nuklir akibat *arms race*, maka muncul kekhawatiran jika kepemilikannya akan sulit dikendalikan seiring waktu. Dengan dorongan dari negara lain dan demi menjaga agar tidak terjadi politisasi nuklir ke negara lain, maka Amerika Serikat dan Rusia merasa perlu diadakan pengurangan kepemilikan senjata ini. Diadakanlah berbagai pertemuan dan kesepakatan terkait pengurangan penggunaan dan ketergantungan senjata nuklir sejak tahun 1946.

¹³ http://amscontrolcenter.org/assets/pdfs/START_Briefing_Book_4-6-2010.pdf (diakses tanggal 17 Mei 2010).

¹⁴ Paul Battersby & Joseph M. Siracusa, *Globalization & Human Security*, United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2009, hal. 176.

Amerika Serikat dan Rusia telah lama mengusahakan agar terciptanya perjanjian non-profilerasi nuklir, yaitu sebuah perjanjian untuk mengurangi percepatan produksi dan pengembangan senjata nuklir.¹⁵ Diharapkan pengembangan nuklir tidak lagi bergerak dalam bidang persenjataan tapi sebagai energi alternatif atau pengayaan produk pangan. Perjanjian mengenai nuklir pertama yang benar-benar terjadi dimulai pada negosiasi larangan uji coba nuklir pada 31 Oktober 1958 dengan hasilnya *Partial Limited Ban Treaty* tahun 1963 yang isinya antara lain agar tidak menguji coba senjata nuklir dalam tingkat atmosfer, luar angkasa, dan bawah laut. Kemudian disusul dengan perjanjian-perjanjian lain hingga beberapa tahun belakangan ini.¹⁶

Dari seluruh pertemuan dan perjanjian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang kemudian kita kenal sebagai negara Rusia, *New Strategic Arms Reduction Treaty* (*New START*) merupakan salah satu kesepakatan yang paling penting. Mengingat *New START* adalah kelanjutan dari berbagai perjanjian nuklir sebelumnya yang kini menjadi perjanjian terbesar dalam pengurangan kepemilikan senjata nuklir secara massal. Perjanjian *New START* direncanakan akan mampu mengurangi jumlah kepemilikan senjata nuklir hingga 60%.¹⁷

Semenjak era Perang Dingin pada tahun 1960an hingga sekarang telah tercapai banyak perjanjian pengurangan dan pembatasan kemampuan serangan nuklir kedua negara. Hal ini bisa tercapai karena adanya kesadaran kedua negara bahwa senjata yang nuklir yang mereka produksi selama Perang Dingin tidak pernah digunakan sama sekali.¹⁸ Hal ini terjadi akibat adanya efek *deterrence*, yaitu Amerika Serikat atau Uni Soviet tidak akan melakukan serangan karena khawatir negara mereka akan balik diserang sehingga yang terjadi adalah

¹⁵ Jennifer A. Hurley, *Weapons of Mass Destruction: Opposing Viewpoint*, California: Greenhaven Press, Inc., 1999, hal. 155.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 159.

¹⁷ "Treaty Between The United States Of America And The Russian Federation On Measures For The Further Reduction And Limitation Of Strategic Offensive Arms" (diakses melalui http://amscontrolcenter.org/assets/pdfs/START_Briefing_Book_4-6-2010.pdf tanggal 17 Mei 2010)

¹⁸ Jennifer A. Hurley, *Op.Cit.*, hal. 58.

efek saling menghabisi satu sama lain.¹⁹ *Deterrence* menciptakan kondisi tidak pernah digunakannya senjata ini dan hanya menjadi alat politik dalam bidang keamanan.²⁰

Bagi Amerika Serikat dan Rusia, pengurangan senjata nuklir akan memberikan citra baik kepada dunia internasional. *New START* akan membuktikan kesungguhan kedua negara ini untuk berfokus tidak lagi kepada masalah militer. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan presiden kedua negara ini untuk meningkatkan kepercayaan dan komoditas ekspor dalam menunjang ekonomi domestik yang baru saja diserang resesi global. Hal ini juga sesuai dengan strategi kebijakan luar negeri kedua negara dalam situs resmi masing-masing. Kedua negara berfokus dalam stabilitas domestik khususnya dalam bidang ekonomi, dan khusus bagi Amerika Serikat bukan hanya mengurangi senjata nuklir mereka tapi juga negara lain. Amerika Serikat mulai mengecam negara-negara yang memiliki nuklir tanpa persetujuan negara anggota klub nuklir. Meskipun masih dipertanyakan tujuan politisnya.

Perubahan strategi luar negeri Amerika Serikat dan Rusia adalah gambaran dari bagaimana kepentingan nasional mereka telah mengalami perkembangan. Kepemilikan nuklir tidak lagi menjadi bagian dari strategi utama mereka, yang diutamakan adalah perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia. Hal ini sesuai dengan kondisi dunia saat ini yang memaksa mereka untuk mengurus perekonomian dalam negeri. Melalui perbandingan kebijakan luar negeri kedua negara, ditemukan beberapa persamaan dalam penjabaran strategi luar negeri Amerika Serikat dan Rusia antara lain, bagaimana mereka merasa perlunya penguatan ekonomi, penanggulangan terorisme, dan strategi untuk kembali merebut perhatian, simpati, dan empati dunia internasional.²¹

¹⁹ Robert Jastrow, *How to Make Nuclear Weapon Obsolete*, Toronto: Little, Brown and Company, 1985, hal. 123.

²⁰ Michael G. Roskin, *Op.Cit.*, hal. 216.

²¹“U.S. National Security Strategy 2010 dan *Strategia Natsionalnoi Bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii do 2020 Goda*” (diakses melalui <http://www.nationalstrategy.com/> tanggal 3 November 2010 dan <http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html> tanggal 3 November 2010).

Perkembangan masyarakat dunia yang semakin demokratis memunculkan kesadaran politik dalam diri mereka. Hal ini ikut menjadi salah satu faktor penting berdirinya berbagai gerakan kemanusiaan, yang diantaranya adalah gerakan anti-nuklir, gerakan anti-perang, gerakan lingkungan, dll. Kelompok masyarakat inilah yang ikut mendorong non-profilerasi nuklir Amerika Serikat dan Rusia.²² Selain itu, kehadiran negara-negara berkembang yang tidak memiliki nuklir namun memiliki posisi strategis dalam strategi keamanan negara-negara maju ikut mempengaruhi minimalisasi keberadaan senjata nuklir. Perkembangan selanjutnya adalah ikut bergabungnya negara-negara Eropa dalam gerakan menolak nuklir ini, dengan alasan bahwa mereka berada diantara kedua negara ini dan jika perang terjadi mereka akan terkena dampaknya secara langsung.²³

Jumlah senjata nuklir yang dirasa masih cukup besar pada pihak Amerika Serikat maupun Rusia dan sebagai bagian dari kondisi *deterrence* membuat kedua negara secara berkelanjutan, walaupun pernah terhambat, berusaha mengurangi jumlah nuklir yang mereka simpan. Bagi kedua negara, hal ini tentu sangat berat untuk diputuskan. Selain karena masih adanya perdebatan antara pendukung dan mereka yang menolak keberadaan nuklir baik para akademisi, pengamat, maupun politisi, juga karena kurangnya kepercayaan antara kedua negara. Kekhawatiran jika Amerika Serikat mengurangi nuklirnya tapi Rusia tidak atau sebaliknya, membuat kecurigaan mengganggu negara ini. Namun, dengan keyakinan kedua negara melalui pemimpin negara mereka bahwa dunia sudah siap untuk tidak memiliki nuklir menjadi sebuah peluang baik tercapainya dunia bebas nuklir di masa yang akan datang.

²² General Sir John Hackett, *The Third World War: The Untold Story*, New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1982, hal. 17.

²³Robert Jastrow, *Op.Cit.*, hal. 135.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Sesuai dengan strategi keamanan yang dikeluarkan Amerika Serikat dan Rusia,²⁴ masalah pertahanan tidak lagi berada dalam tataran negara melawan negara tapi negara melawan organisasi atau gerakan-gerakan, misalnya gerakan separatis, terorisme, atau fundamentalis dan radikalisme. Melihat hal ini maka dianggap penting bagi kedua negara untuk mulai meninggalkan senjata pemusnah massal konvensional yang mereka miliki, yaitu nuklir. Tujuan utamanya adalah menarik perhatian dan empati negara lain serta membuka jalur diplomasi yang bersifat lebih demokratis bukannya militeristik. Dengan demikian maka Amerika Serikat dan Rusia akan mampu membuka jalur lain dalam bekerja sama dengan negara lain, seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan sosial.

Kepentingan nasional mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan negara yang akan tergambarkan dalam kebijakan luar negeri mereka. Saat ini, baik Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mengadopsi gerakan non-proliferasi nuklir dalam kepentingan nasional mereka. Salah satu cara pencapaian non-proliferasi nuklir adalah dengan bersama-sama mengurangi kepemilikannya dan saling mengawasi penggunaannya kemudian lebih berfokus pada pada bidang lainnya. Hal inilah yang tergambarkan dalam perjanjian *New START* yang telah ditandatangani oleh presiden kedua negara, Barrack Obama dan Dimitry Medvedev pada bulan April 2010 di Praha. Menurut situs jaringan pemerintahan masing-masing negara, kedua negara dibawah pemerintahan yang baru cukup antusias dengan pencapaian *New START* di masa yang akan datang terlepas dari berbagai kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi di tahun-tahun berikutnya dan dengan terus mengambil pelajaran berharga dari beberapa perjanjian sebelumnya.

Menyadari pentingnya perjanjian ini bagi kedua negara dimasa kini dan yang akan datang, dan dengan melihat hal ini sebagai sebuah faktor yang akan ikut mempengaruhi

²⁴U.S. National Security Strategy 2010, Loc. Cit.

kondisi nuklir dunia maka penulis kemudian membagi batasan dan rumusan masalah dari karya tulis ini menjadi dua, yaitu:

1. Apakah arti penting *New START* bagi Amerika Serikat dan Rusia?
2. Bagaimana peluang dan tantangan implementasi *New START* bagi Amerika Serikat dan Rusia di masa depan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui arti penting *New START* bagi Amerika Serikat dan Rusia.
2. Mengetahui peluang dan tantangan implementasi *New START* bagi Amerika Serikat dan Rusia di masa depan.

2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai data dan informasi di masa yang akan datang, khususnya dalam pengembangan studi hubungan internasional di bidang keamanan dan diplomasi nuklir.
2. Sebagai masukan dan data tambahan dalam melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut terkait masalah perjalanan perjanjian non-proliferasi nuklir Amerika Serikat dan Rusia.

D. Kerangka Konseptual

David Clinton mengatakan, “*national interest in this way comprised a system of restraint on states’ actions as effective as the rules of international law or the traditions of diplomatic practice.*”²⁵ Dari penjelasannya dapat dipahami kemudian bahwa kepentingan

²⁵David Clinton, *National Interest: Rhetoric, Leadership, and Policy*, Boston: University Press of America, 1988, hal. 47-48.

nasional adalah konsep kunci dalam politik luar negeri. Konsep tersebut dapat diorientasikan pada ideologi suatu negara ataupun pada sistem nilai sebagai pedoman perilaku negara tersebut. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan. Atas dasar itulah dalam setiap pembuatan kebijakan menjadi hal yang penting untuk mampu menentukan strategi yang cakap ketika menghadapi sistem internasional yang anarkis.²⁶

Lingkungan internasional adalah sebuah dunia yang anarkis. Setiap negara akan mengedepankan kepentingan nasional masing-masing, entah melalui diplomasi dan kerjasama, atau *hard power* seperti tekanan internasional, embargo, atau perang. Berbagai ancaman akan muncul dan menguji langkah strategis setiap negara dalam menghadapinya. Konsep dalam *defensive structural realism* menawarkan jalan bagi negara untuk menghadapi ancaman dengan menggunakan pemahaman kekuatan untuk bertahan, bukan menyerang. Kekhawatiran akan terjadinya tindakan serupa dari negara lain yang berbuntut pada *arms race* dan *security dilemma*, adalah alasan yang cukup jelas untuk memperhatikan tawaran para *defensive realist*. Hal ini dalam pengaplikasiannya dapat didasarkan pada perhitungan matematis dan rasional menggunakan *offense-defense balance* dengan matriks-matriks dari *game theory*.²⁷

Game theory bisa dikatakan sebagai sebuah alat ukur, atau menggunakan istilah Thomas C. Schelling adalah sebuah ‘permainan strategi’ yang akan membantu negarawan dan pembuat kebijakan di lingkungan internasional. Dengan menjadikan hubungan internasional bagaikan permainan dengan hitungan matematis dan logis, *game theory* mencoba menyusun analisa atas hubungan dua atau lebih aktor, membantu ahli teori hubungan internasional

²⁶Sumpena Prawira Saputra, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Remaja Karya Offset, 1985, hal. 24.

²⁷John J. Mearsheimer, *Structural Realism*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hal. 75-78.

menjelaskan interaksi aktor di dalamnya, dan membantu para praktisi dalam mempengaruhi interaksi tersebut demi membela aktor yang sedang diwakili.²⁸

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dari beberapa rumusan yang diambil oleh penulis, maka penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode prediktif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba memberikan gambaran umum nuklir di Amerika Serikat dan Rusia sebelum akhirnya prediksi bagaimana penerapan *New START* pada keberadaan nuklir di Amerika Serikat dan Rusia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, dan situs-situs internet atau laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Mengingat data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan ini telah tersedia dalam bentuk laporan yang bisa ditemukan di dunia maya dan buku-buku yang didapatkan penulis maka pengumpulan data di beberapa lembaga hanya sebagai pelengkap. Data yang diperoleh dari beberapa tempat yang terkait yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar
- b. Perpustakaan Fisip Universitas Hasanuddin di Makassar

²⁸Hector Correa, "Game Theory as an Instrument for the Analysis of Internastional Relations" (diakses melalui <http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/vol14-2/14-2hector.pdf> tanggal 29 September 2011) dan James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff Jr., *Contending Theories of Internationl Relations*, J. B. Lipincott Company, 1971, hal. 347.

c. Perpustakaan Himahi Universitas Hasanuddin di Makassar

3. Jenis Data

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan data sekunder dari berbagai literatur terkait. Data-data tersebut antara lain: buku, jurnal, data internet. Adapun data sekunder yang dibutuhkan adalah data mengenai perjalanan diplomasi nuklir Amerika Serikat dan Rusia serta pengesahan *New START* dan dampak-dampak yang telah dan akan ditimbulkannya bagi Amerika Serikat dan Rusia.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang akan digunakan dalam karya tulis ini adalah deduktif, yaitu penggambaran masalah akan dilakukan secara umum melalui garis-garis besarnya sebelum akhirnya membahasnya secara khusus dan lebih detail. Yang dimaksud bersifat umum dalam persoalan ini adalah perjalanan nuklir sebagai sebuah aspek penting dalam diplomasi dan strategi antara kedua negara, Amerika Serikat dan Rusia pada masa Perang Dingin hingga kini. Hal-hal yang kemudian lebih bersifat khusus yang selanjutnya akan dibahas adalah perjanjian non-proliferasi nuklir antara kedua negara khususnya kesepakatan New START dan implementasi serta implikasinya bagi kedua negara bagi masa kini dan dimasa yang akan datang.

BAB III

GAMBARAN UMUM

Penggunaan bom atom untuk pertama kalinya di Hiroshima telah menjadi sebuah batas sejarah penting dunia. Batas yang memisahkan akhir dari Perang Dunia II dan awal dari politik dunia yang segera akan dibayangi oleh senjata nuklir. Berbagai spekulasi kemudian muncul pasca serangan ini. Ada anggapan bahwa serangan ini bagi parapasukan negara sekutu adalah bentuk diplomasi masa perang. Ada juga anggapan serangan ini terkait dengan kekhawatiran Amerika Serikat atas keinginan Uni Soviet untuk ikut dalam Teater Pasifik, karena saat itu Uni Soviet baru saja memenangkan Teater Eropa dengan berhasil menguasai Berlin. Pendapat ini dikuatkan ketika perang berakhir saat Uni Soviet meminta agar Jepang ikut dibagi dalam zonasi seperti Jerman dan Uni Soviet juga mendapat bagian. Anggapan berikutnya bahwa serangan ini sebenarnya semata-mata keinginan para elit politik, militer, dan ilmuwan Amerika Serikat untuk menunjukkan superioritas Amerika Serikat pada dunia.²⁹

Masa yang bagi sebagian ahli disebut “era nuklir” melahirkan berbagai penyesuaian konsep kepentingan nasional dengan kebijakan luar negeri saat itu. Demi mengatasi kemunculan teknologi ini, negara membutuhkan langkah-langkah strategis dan tepat sasaran, mengingat betapa berbahayanya senjata nuklir. Termasuk dua dari negara pemenang Perang Dunia II, AS dan Uni Soviet dengan berbagai kebijakan luar negerinya yang membawa anarkisme hubungan internasional pada tingkatan yang lebih jauh dan membagi dunia ke dalam blok barat dan blok timur.³⁰ Oleh karena itu pembahasan berikutnya akan dimulai dengan gambaran umum strategi nuklir kedua negara saat itu sebelum akhirnya beralih

²⁹Ian Clark, *Nuclear Past, Nuclear Present*, Colorado: Westview Press, Inc., 1984, hal. 1; Joseph S. Nye, Jr., *Understanding International Conflicts*, Harvard University: Pearson Longman, 2009, hal. 122.

³⁰Ian Clark, *Op.Cit.*, hal. 19-22; P. Edward Haley, David M. Keithley, and Jack Merritt, *Nuclear Strategy, Arms Control, and The Future*, Colorado: Westview Press, Inc., 1985, hal. 7-18; General Sir John Hackett, *The Third World War: The Untold Story*, New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1985, hal. 1-6.

kepada bentuk-bentuk diplomasi nuklir yang telah dijalankan kedua negara hingga sampai kepada perjanjian terbaru, New START.

A. Strategi Nuklir Amerika Serikat dan Rusia

Perang Dingin tidak hanya mengacu kepada suatu rentang waktu dalam sejarah internasional, tapi juga menjelaskan keseluruhan hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet saat itu. Perang Dingin adalah sebuah pertikaian atas kekuasaan antara negara superpower saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet.³¹ Tradisionalis, revisionis, dan postrevisionis, tiga pendekatan yang digunakan saat itu untuk mengetahui sebab Perang Dingin juga mengakui hal yang serupa.³² Kata ‘perang’ menggambarkan ketegangan yang terjadi, konflik bersenjata, hubungan zero-sum kedua negara, sementara kata ‘dingin’ mengacu kepada adanya faktor-faktor yang menahan pertentangan ini sehingga tidak menjadi ‘panas’ atau perang terbuka.³³ Sehingga didefinisikan bahwa Perang Dingin adalah pertikaian ketegangan tingkat tinggi antara Timur dan Barat yang berujung pada ancaman penggunaan senjata nuklir.³⁴

Pertempuran memang terjadi dalam Perang Dingin tapi hanya pada sekitar kedua negara *superpower*. Pertikaian yang terjadi muncul dalam dua ranah, yaitu politik dan militer. Dalam politik misalnya penyebaran paham komunis yang menghasilkan konsep efek domino, *marshall plan*, atau kebijakan *containment*. Dalam militer misalnya peran kedua negara langsung maupun tidak langsung di Vietnam, Korea, atau Afghanistan. Hal ini sesuai dengan penjelasan tiga pendekatan bahwa ketika Amerika Serikat berusaha mengejar pengaruh untuk

³¹ Martin Griffiths dan Terry O’Callaghan, *Op.Cit.*, hal. 35.

³² Joseph S. Nye, Jr., *Understanding International Conflicts*, *Op.Cit.* hal. 118-119.

³³ Martin Griffiths dan Terry O’Callaghan, *Op.Cit.*, hal. 36.

³⁴ *Ibid.*

menguasai sistem internasional, Uni Soviet melakukannya melalui penguasaan teritori sebelum ikut juga memperluas pengaruh komunisme-nya.³⁵

Dalam *Understanding International Conflicts* Joseph S. Nye membagi awal mula Perang Dingin ke dalam tiga fase, yaitu Tahap Permulaan (1945-1947), Deklarasi Perang Dingin (1947-1949), dan Puncak Perang Dingin (1950-1962). Lebih jauh Joseph S. Nye kemudian menyebutkan bahwa ada enam isu yang menjadikan strategi Amerika Serikat saat itu berubah dan ikut mendorong dimulainya Perang Dingin. Salah satu isu tersebut adalah bom atom. Presiden Roosevelt menolak membagi rahasia pembuatan bom atom kepada Uni Soviet pasca Perang Dunia II. Para ahli setuju ketika Presiden Truman menggunakan bom atom semata-mata hanya untuk segera mengakhiri perang, bukannya untuk mengintimidasi Uni Soviet seperti pendapat para revisionis, meskipun disadari Presiden Truman bahwa bom ini akan mendapat efek politis.³⁶

Pada pertemuan Postdam tahun 1945, Truman baru memberitahu kepada Stalin bahwa Amerika Serikat punya bom atom. Stalin tentu saja telah mengetahuinya melalui mata-matanya. Amerika Serikat mengajukan *Baruch Plan* pada tahun 1946 kepada PBB yang baru saja terbentuk, yang isinya adalah untuk mengatur penggunaan senjata nuklir. Stalin menolaknya dengan anggapan bahwa meskipun dibawah kontrol internasional bom atom tetap saja milik Amerika Serikat. Karena hanya mereka yang memilikinya dan tahu cara membuatnya. Stalin percaya bahwa akan lebih baik jika Uni Soviet punya bom atom sendiri demi menjaga keamanan mereka.³⁷

Uni Soviet mulai serius mengembangkan program nuklirnya pada tahun 1943, itupun setelah mendapatkan informasi program nuklir Amerika Serikat dan Inggris. Perlu diketahui

³⁵Joseph S. Nye, Jr., *Understanding International Conflicts*, *Op.Cit.*, hal. 116-138; Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan, *Op.Cit.*, hal. 35-38.

³⁶Joseph S. Nye, Jr., *Understanding International Conflicts*, *Op.Cit.*, hal. 122-124.

³⁷*Ibid.*

sebenarnya Uni Soviet termasuk negara yang telah memulai penelitian soal *fission* terhadap uranium dan reaktornya sebelum Perang Dunia II dimulai. Program yang saat itu murni penelitian ilmiah dan akademis terpaksa dihentikan saat Perang Dunia II dimulai karena Uni Soviet fokus membangun kekuatan perang konvensional.³⁸

Uni Soviet berusaha melanjutkan penelitiannya, apalagi setelah keberhasilan Amerika Serikat meledakkan bom atomnya di Jepang, dengan membentuk Komite Spesial untuk mendorong akselerasi penuh program nuklir Uni Soviet. Komite yang langsung berada di bawah Politburo ini berhasil meledakkan bom yang mirip dengan *Fat Man* (salah satu bom atom yang diledakkan Amerika Serikat) di Semipalatinsk. Kesejajaran secara strategis dengan Amerika Serikat dicapai Uni Soviet melalui ICBM (*inter-continental ballistic missiles*) R-36 dan UR-100, kemudian Project 667A yang menyamai sistem Polaris Amerika Serikat. Kesejajaran secara kuantitatif bahkan melampaui Amerika Serikat dicapai pada tahun 1978.³⁹

“The hope of civilization lies in international arrangements looking, if possible, to the renunciation of the use and development of the atomic bomb”, pesan Presiden Truman kepada Kongres AS pada Oktober 1945. Pesan yang dimaksudkan agar dunia menghentikan pengejaran kekuatan bom ini adalah bukti ketakutan Truman saat itu, ketakutan yang ikut dirasakan oleh para ilmuwan di Manhattan Project. James Franck, seorang fisikawan yang ikut membuat bom atom, memandang ke depan tentang bagaimana setelah bom ini selesai dibuat mengingat Nazi telah kalah di bulan Juni. Franck kemudian membentuk komite untuk menimbang dampak dari bom ini kelak. Selain Franck, komite ini beranggotakan Eugene Rabinowitch penyusun naskah laporan komite ini (yang kemudian akan menjadi pendiri

³⁸Pavel Podvig, *Russian Strategic Nuclear Forces*, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2001, hal. 1-8.

³⁹*Ibid.*; Robert S. Norris dan Hans M. Kristensen, *Bulletin of the Atomic Scientist: Global nuclear weapon inventories, 1945-2010*, 2010, hal 81-82.

Bulletin of the Atomic Scientist), dan Leo Szilard yang menolak penggunaan bom ini di Jepang.⁴⁰

Franck, Rabinowitch, dan Szilard mengkhawatirkan penyebaran tidak terkendali energi atom kelak dan moralitas penggunaannya. Para ilmuwan ini memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengandalkan kelebihan yang dimilikinya dalam senjata atom. Senjata nuklir tidak akan menjadi monopoli Amerika selamanya karena kerahasiaannya sendiri cepat atau lambat akan terbongkar.⁴¹ Terdepan dalam produksi senjata ini merupakan sumber keamanan yang salah, seperti yang dikutip dalam *Report of the Committee on Political and Social Problems*, “quantitative advantage in reserves of bottled destructive power will not make us safe from sudden attack”.⁴² Mereka kemudian menyimpulkan jika setelah peledakan pertama tidak ada perjanjian internasional terkait senjata ini maka ‘perlombaan senjata tanpa batas akan dimulai’.⁴³

James Franck juga menuliskan dalam *Report of the Committee on Political and Social Problems* bahwa:

*“it will be very difficult to persuade the world that a nation which was capable of secretly preparing and suddenly releasing a weapon, as indiscriminate as the rocket bomb and a thousand times more destructive, is to be trusted in its proclaimed desire of having such weapons abolished by international agreement.”*⁴⁴

Komite ini sadar bahwa keinginan non-profilerasi haruslah solusi politik yang diterima secara universal dan akan sulit bagi negara yang menggunakan kekuatan ini untuk mendapatkan kepercayaan negara lain sebagai negara yang dengan sukarela menghilangkan kekuatan nuklirnya begitu saja. Penyebaran teknologi nuklir tidak akan bisa dibendung. Dalam

⁴⁰Joseph Cirincione, *Op.Cit.*, hal. 14-16.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Report of the Committee on Political and Social Problems*, Manhattan Project Metallurgical Laboratory, University of Chicago, 11 Juni 1945.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

laporannya mereka menuliskan desakan mereka agar tidak melihat kekuatan ini sebagai keuntungan militeristik saja tapi juga dalam kerangka kebijakan nasional jangka panjang:

*“we urge that the use of nuclear bombs in this war be considered as a problem of long-range national policy rather than military expediency, and that this policy be directed primarily to the achievement of an agreement permitting an effective international control of the means of nuclear warfare.”*⁴⁵

Ketakutan Truman, Franck, Rabinowitch, dan Szilard akhirnya menjadi kenyataan ketika penolakan *Baruch Plan* oleh Stalin disusul keberhasilan ledakan nuklir pertama Uni Soviet pada tanggal 29 Agustus 1949 di Semipalatinsk.⁴⁶

Tidak seperti Perang Dunia I, banyak anggapan bahwa dalam berjalannya Perang Dunia II dinilai lebih mementingkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Perbedaan ini terlihat bahwa dalam Perang Dunia I negara-negara pesertanya tidak sekedar terlibat dalam pembantaian pasukan mereka dengan menggunakan strategi parit dan bergerak dalam barisan. Hampir seluruh negara peserta Perang Dunia II kembali mengutamakan strategi militer yang mengutamakan hidup prajuritnya dibandingkan pada masa Perang Dunia I. Meskipun demikian, semua hal ini terancam dengan kehadiran senjata nuklir. Jika dibandingkan dengan Perang Dunia I, daya hancur senjata nuklir jauh lebih destruktif dengan keunggulan efisiensi waktu dan efektifitas dampaknya. Menurut Departemen Pertahanan AS hal ini sangat disadari, bahwa jika terjadi ledakan beberapa nuklir sekaligus pada bumi belahan utara maka akan terjadi *“nuclear winter”*. *“Nuclear winter”* atau musim salju nuklir adalah kondisi ketika abu dan asap dari serangan nuklir akan mampu menutupi awan dan langit dan sinar matahari tidak dapat menembus bumi hingga udara menjadi dingin bahkan membeku. Berbagai bentuk kehidupan akan rusak termasuk seluruh wilayah di dunia yang menghasilkan makanan.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Joseph Cirincione, *Op.Cit.*, hal. 6.

Sebuah gambaran yang mengancam 3 milyar penduduk sementara sisanya akan hidup dengan berbagai penyakit.⁴⁷

Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki sejarah buruk dengan serangan mendadak. Amerika Serikat pernah diserang secara mendadak oleh Jepang pada tanggal 7 Desember 1941,⁴⁸ sementara Uni Soviet oleh Jerman pada 22 Juni 1941.⁴⁹ Peristiwa tersebut ternyata menjadi salah satu pendorong dan alasan psikologis dua negara ini memacu produksi hulu ledak serta ICBM mereka. Sekelompok spesialis melakukan wawancara kepada 22 perwira senior militer yang bekerja di *Soviet General Staff* dan *Strategic Rocket Force* antara tahun 1989 hingga 1994. Para peneliti menemukan ternyata sejak awal 1970an kepemimpinan militer Uni Soviet telah menyadari mereka tidak akan bisa menang dalam perang nuklir. Oleh karena itu, mereka menyiasatinya dengan penambahan jumlah kekuatan militer yang signifikan dan menggunakan prinsip *deterrence*. Laporan Pavel Podvig menambahkan bahwa sejak tahun 1970an hingga 1980an para pemimpin Amerika Serikat melihat kekuatan nuklir Uni Soviet tidak hanya bertambah dalam jumlah saja tapi juga akurasi ICBM mereka. Hal inilah yang membuat *deterrence* berjalan dengan baik saat itu dan berujung pada sikap kedua negara untuk bersiap dengan segala kemungkinan: pencegahan, peluncuran singkat, dan serangan balasan.⁵⁰

*“The massive proliferation of nuclear weapons in the United States, the Soviet Union, and elsewhere has radically challenged traditional approaches to war and strategy and the uses of military force for rational purposes. Efforts to create an acceptable and viable strategy for the management of this dangerous military power in an adversarial superpower relationship have been anything but easy and reassuring”.*⁵¹

⁴⁷ P. Edward Haley, David M. Keithley, and Jack Merritt, *Nuclear Strategy, Arms Control, and The Future*, Colorado: Westview Press, Inc., 1985. hal. 2-7; Susan Willett, *Cost of Disarmament-Disarming the Costs*, Geneva: UNIDIR, 2003, hal. 11-12.

⁴⁸ Howard Cincotta, *Garis Besar Sejarah Amerika*, Departemen Luar Negeri Amerika, 2004, hal.302.

⁴⁹ P. K. Ojong, *Perang Eropa Jilid I*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hal. 358.

⁵⁰ Robert S. Norris dan Hans M. Kristensen, *Bulletin of the Atomic Scientist: Nuclear U.S. and Soviet/Russian Intercontinental Ballistic Missiles 1959-2008*, 2009, hal 63-64.

⁵¹ Roman Kolkowicz, *Dilemmas of Nuclear Strategy*, London: Frank Cass. 1987, hal. 3.

Kalimat yang ditulis oleh Roman Kolkowicz dalam *Dilemmas of Nuclear Strategy* ini menggambarkan bagaimana senjata nuklir telah mengubah susunan strategi, manajemen, dan pendekatan dalam menaksir bahaya sebuah peperangan.

Politik luar negeri suatu negara dilakukan dengan dua alat yaitu *persuasion* dan *coercion*, atau jika meminjam istilah Raymond Aron, diplomasi dan strategi. Batasan dari *persuasion* adalah ketika meminta sebuah negara untuk melakukan sesuatu dan akan memberikan imbalan dalam penyelesaiannya. Namun ketika dimasukkan unsur ancaman jika negara yang diinginkan membantah atau tidak memperdulikan maka akan masuk ke dalam bentuk *coercion*. Dalam batasan pilihan ini, pemimpin negara akan menggunakan rencana atau langkah-langkah yang sesuai demi mencapai tujuannya. Jika rencana yang dipilih melibatkan unsur *coercion* maka rencana tersebut menjadi strategi. Sehingga dapat diartikan bahwa strategi adalah menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan militer demi mencapai kepentingan nasional.⁵²

Menurut para pemikir realis, perang memang telah menjadi kecenderungan bertahun-tahun dalam kehidupan alami manusia dan tidak akan dapat dirubah atau dikendalikan melalui hukum atau pendekatan moral. Bahkan, menurut mereka rasa takut atas hukuman besar atau pembalasan (ide utama *deterrence*), atau sikap hati-hati ketika menghadapi biaya-biaya yang mustahil dan hasil yang tidak terprediksi, akan menekan negarawan untuk bertindak agresif.⁵³

Deterrence atau pencegahan berkembang pasca 1945 ketika Amerika Serikat berusaha bergulat dengan perubahan yang akibat senjata nuklir. Menurut Bernard Brodie seorang ahli

⁵² P. Edward Haley, David M. Keithley, and Jack Merritt, *Op.Cit.*, hal. 2-7.

⁵³ Richard Devetak, Anthony Burke, Jim George, *An Introduction to International Relations: Australian Perspectives*, New York:Cambridge University Press, 2007, hal. 147.

strategi, “*thus far the chief purpose of a military establishment has been to win wars. From now on its chief purpose must be to avert them.*”⁵⁴

Menurut Alan Dupont, makna keamanan yang diperluas tidak terpisah dari seorang realis tradisional memahami dilema keamanan dalam militer. Pasca Perang Dingin tercipta ancaman dan tantangan keamanan yang lebih luas bagi negara, misalnya terorisme, gerakan radikal, kejahatan transnasional, penyakit, atau degradasi lingkungan. Ancaman ini tidak datang dari negara atau pasukan bersenjata, tapi tetap mempengaruhi nilai-nilai dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan ancaman atau politik luar negeri dengan kesan *coercion* sangatlah penting pada masa nuklir ketika Perang Dingin sebagai inti dari strategi *deterrence*. Dengan kekuatan nuklir yang sangat destruktif, ancaman untuk meledakkannya demi mencegah agresi menjadi lebih krusial dibandingkan dengan penggunaan senjata dan pasukan konvensional. Terdapat dua faktor utama dalam strategi *deterrence* yaitu kemampuan dan keinginan. Ketika dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kekuatan, sebuah negara harus memiliki kemampuan atau misalnya jumlah pasukan dan kekuatan serangan yang memadai yang berfungsi dengan baik sebagai ancaman. Negara kemudian harus terlihat betul-betul memiliki keinginan untuk menggunakan kekuatan tersebut sehingga negara lawan akan merasakan ancaman tersebut. Jika dalam pengaplikasian faktor kemampuan dan keinginan ini gagal, bahkan salah satunya saja, atau negara lawan tidak merasa tertekan atau terancam maka strategi *deterrence* tersebut berkurang kekuatannya. Dapat dipahami kemudian bahwa tujuan utama dari *deterrence* adalah meningkatkan skala destruktif dibandingkan hasil yang akan dicapai jika perang telah berakhir.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 148.

⁵⁵ P. Edward Haley, David M. Keithley, and Jack Merritt, *Op.Cit.*, hal. 2-7.

Demi menjaga suasana *deterrence* tetap tercipta, kedua negara berusaha melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pemikiran lawannya bahwa ketika serangan terjadi mereka tidak akan segan menggunakan nuklir. Hal ini dilakukan dengan menambah jumlah hulu ledak, mengurangi ukurannya, dan meningkatkan akurasinya. Selain itu, baik Amerika Serikat dan Uni Soviet menjaga agar ICBM mereka mustahil untuk ditembus dengan menyimpan nuklir mereka didalam silo yang terbuat dari beton dan terkubur jauh di bawah tanah. Atau diletakkan di dalam kapal selam sehingga sulit terdeteksi dan dapat diluncurkan langsung dari dalam air, yang disebut juga *submarine-launched ballistic missile* atau SLBM. Bahkan seperti Amerika Serikat yang meletakkannya di dalam pesawat pengebom agar dapat dibawa kemana-mana. Kedua negara kemudian mengembangkan sistem rudal *anti-ballistic missile* atau ABM pada awal tahun 1960-an, kemudian dilanjutkan lagi pada awal tahun 1970-an. Tujuannya sebagai pertahanan untuk menembak jatuh rudal berhulu ledak nuklir sebelum memasuki batas negara masing-masing.⁵⁶

Skala kekuatan kedua negara baik dari segi kekuatan serang, seperti jumlah hulu ledak, ICBM, SLBM, dan *bomber*, maupun kemampuan bertahan, seperti ABM dan penempatannya mulai dirasakan perlu mendapat batasan. ABM Treaty dan SALT I kemudian menjadi awal solusi kedua negara dan kerjasama dalam pembatasan senjata masing-masing,⁵⁷ walaupun sebenarnya perjanjian ini bukan kerjasama pertama Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam urusan nuklir.

B. Diplomasi Nuklir selama Perang Dingin

Kronologi diplomasi nuklir Amerika Serikat dan Rusia (Uni Soviet selama Perang Dingin) pertama kali diketahui berasal dari *Baruch Plan* pada tahun 1946.⁵⁸ Situs resmi

⁵⁶ P. Edward Haley, David M. Keithley, and Jack Merritt, *Op.Cit.*, hal. 2-7.

⁵⁷ Pavel Podvig, *Russian Strategic Nuclear Forces*, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2001, hal. 8.

⁵⁸ Jennifer A. Hurley, *Weapons of Mass Destruction: Opposing Viewpoint*, California: Greenhaven Press, Inc., 1999. hal. 159.

Departemen Luar Negeri menjelaskan bahwa *Baruch Plan* adalah proposal Amerika Serikat kepada PBB untuk mendorong penghapusan pengembangan nuklir sebagai senjata dan mendirikan organisasi internasional yang berperan aktif dalam mengawasi dan mengatur penggunaan kekuatan nuklir pasca kejadian Hiroshima-Nagasaki sehingga tidak digunakan selain demi tujuan damai. Ditambahkan juga bahwa *Baruch Plan* akan menghapus hak veto Dewan Keamanan PBB. Sebagai gantinya Amerika Serikat akan menghentikan aktifitas nuklirnya dan menghancurkan semua senjata nuklir yang dimilikinya saat itu setelah *Baruch Plan* diterima oleh PBB.⁵⁹

Uni Soviet saat itu tentu saja menolak dengan tegas *Baruch Plan* dengan alasan bahwa ketika proposal ini disahkan maka Amerika Serikat akan memiliki masa menjadi negara yang memonopoli semua kemampuan nuklir. Menyerahkan fungsi pengawasan kepada PBB juga adalah tindakan tidak tepat, mengingat PBB didominasi oleh sekutu Amerika Serikat. Penghapusan kemampuan hak veto juga dipandang sebagai pelemahan bagi Uni Soviet, mengingat tanpa hak veto Uni Soviet akan sendirian menghadapi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Uni Soviet sendiri sebenarnya mengajukan syarat tandingan agar Amerika Serikat terlebih dahulu menghapus kemampuan nuklirnya sebelum proposal ini diterima.⁶⁰

Baruch Plan menjadi yang pertama dari berbagai diplomasi dan perjanjian nuklir negara-negara di dunia termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet. *Baruch Plan* tahun 1946 hingga New START tahun 2010 dihubungkan oleh 23 perjanjian yang 18 diantaranya berada dalam era Perang Dingin. Berikut adalah perjanjian-perjanjian tersebut dari situs <http://www.atomicarchive.com/Treaties/> yang diakses pada 10 Agustus 2011 :

1. *Antarctic Treaty* (1959)

⁵⁹<http://history.state.gov/milestones/1945-1952/BaruchPlans> (diakses pada 10 April 2010).

⁶⁰*Ibid.*

Perjanjian pembatasan senjata pertama pasca Perang Dunia II ini diikuti oleh Argentina, Australia, Belgia, Cili, Perancis, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Uni Soviet, Inggris Raya., dan Amerika Serikat. Perjanjian yang diikuti oleh 12 negara ini menginginkan menjaga status aman dan damai di benua antartika. Larangan-larangan yang disepakati adalah (1) pendirian markas militer, (2) kegiatan militer, (3) tempat penyimpanan ataupun pengujian senjata apapun, (4) peledakan nuklir, dan (5) tempat pembuangan sampah radioaktif. Perjanjian ini dianggap penting karena mengingat benua Antartika yang begitu luas, penuh dengan sumber daya alam, dan tidak berpenghuni menjadi alasan sederhana adanya ancaman perebutan wilayah ini, termasuk jika ingin dijadikan tempat uji coba senjata.

Salah satu alasan utama perjanjian ini begitu mudah diterima adalah ketertarikan akan ilmu pengetahuan cenderung lebih besar dibandingkan ketertarikan politik, militer ataupun ekonomi pasca perang. Hal ini dapat dibuktikan dengan hubungan ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berlangsung baik di Antartica. Pada tahun 1956 dan 1957 misalnya, meteorologis Amerika Serikat diizinkan berkunjung ke pos penelitian Soviet, Mirny dan meteorologis Uni Soviet berkunjung ke Little America.

Melalui Konferensi Washington untuk Antartika 15 Oktober hingga 1 Desember 1959, diskusi berlangsung lancar. Negosiasi ditandatangani pada tanggal 1 Desember 1959, disetujui oleh Senat Amerika Serikat dengan ratifikasi pada tanggal 18 Agustus 1960. Perjanjian ini aktif mulai pada tanggal 23 Juni 1961.

2. *Hot Line Agreement* (1963)

Pembahasan dalam perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini menekankan pentingnya sebuah jalur komunikasi langsung antara kedua kepala negara dalam keadaan darurat dan penuh tekanan internasional demi mencegah berbagai kesalahpahaman, kecelakaan, ataupun serangan tiba-tiba yang mampu memicu perang

nuklir. Resiko yang muncul dari keadaan dunia yang baru saja memasuki era nuklir. Uni Soviet merupakan negara pertama yang mengajukan jenis pengamanan dan langkah-langkah mengurangi resiko perang nuklir, tepatnya pada tahun 1954. Hal ini dilandasi kekhawatiran jika perang sampai terjadi hanya karena kecelakaan yang tidak disengaja.

Tanggal 25 September 1961 Presiden Kennedy mengajukan "*Program for General and Complete Disarmament in a Peaceful World*" kepada Majelis Umum PBB yang isinya mengenai langkah-langkah demi mengurangi resiko terjadinya perang. Beberapa hal yang diajukan antara lain sistem pemberitahuan tingkat lanjut bagi manuver dan kegiatan militer, pos pengamatan di pusat transportasi dan pangkalan udara, dan berbagai inspeksi dan kunjungan. Selain itu diperlukan komisi yang akan mempelajari berbagai langkah-langkah lain yang diperlukan, termasuk resiko adanya kegagalan komunikasi. Amerika Serikat menambahkan perlunya pertukaran misi militer bersama demi meningkatkan komunikasi dan pemahaman dan didirikannya sistem komunikasi cepat dan terpercaya antar para kepala negara dan Sekertaris Jenderal PBB dalam konsepnya ke *Eighteen Nation Disarmament Committee* (ENDC) pada tanggal 1 April 1962.

Menyadari konsep yang diajukan pada tanggal 15 Maret 1962 masih dirasa kurang, Uni Soviet kemudian kembali mengajukan amandemen bagi konsepnya dengan menambahkan (1) larangan kegiatan gabungan antar pasukan dari dua negara atau lebih dan sistem pemberitahuan tingkat lanjut pergerakan besar pasukan suatu negara, (2) pertukaran misi militer, (3) peningkatan kemampuan komunikasi antar kepala negara dan Sekjen PBB. Krisis Misil Kuba pada Oktober 1962 menjadi pendorong utama betapa pentingnya sebuah sistem komunikasi antar kepala negara sebagai sebuah langkah pencegahan dan mengurangi resiko perang. Amerika Serikat kemudian menyerahkan

laporan kepada ENDC pada tanggal 12 Desember 1962 yang menekankan pentingnya sebuah jaringan komunikasi dalam keadaan darurat.

Pertemuan tanggal 20 Juni 1963 di Jenewa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang diwakili dalam ENDC kemudian berhasil menyelesaikan negosiasi dan menandatangani “*Memorandum of Understanding Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics Regarding the Establishment of a Direct Communications Link.*” Isinya antara lain adalah agar masing-masing pemerintah bertanggungjawab dalam mengatur jaringannya dalam wilayah masing-masing, termasuk soal keberlanjutan fungsinya secara terus-menerus dan kecepatan pengiriman pesan ke kepala negara masing-masing.

Hot Line Agreement menjadi perjanjian bilateral pertama Uni Soviet dan Amerika Serikat yang memperlihatkan kesadaran kedua negara akan bahaya dalam masa senjata nuklir modern. Salah satu contoh kesuksesan perjanjian ini misalnya dalam perang Arab-Israel tahun 1967, ketika armada Amerika Serikat memasuki Mediterania namun tanpa menimbulkan kesalahpahaman dengan Uni Soviet. Seiring perkembangan sistem komunikasi, penggunaan sistem radio dan telegram diganti dengan satelit.

3. *Limited Test Ban Treaty* (1963)

Sesuai dengan namanya, perjanjian ini berisi larangan bagi melakukan uji coba nuklir pada tempat-tempat “terbuka”, seperti di atmosfer, luar angkasa, dan bawah laut. Meskipun tidak melarang uji coba di dalam tanah, tapi dengan syarat serpihan radioaktif tidak melewati wilayah negara sendiri. Tujuan sederhana perjanjian ini adalah agar tidak ada lingkungan hidup manusia yang terkontaminasi radioaktif. Perjalanan hingga akhirnya perjanjian ini disepakati berlangsung selama delapan tahun. Kendalanya ada pada kerumitan masalah teknis dalam perbedaan masing-masing negara dalam memahami

garis-garis pembatasan senjata dan keamanan mereka. Selain itu kondisi politik yang tidak stabil antara Timur dan Barat selama Perang Dingin ikut menjadi hambatan.

Uji coba senjata nuklir menjadi sebuah masalah penting setelah adanya kekhawatiran akan bahaya serpihan dan gas paparan radioaktif. Misalnya saja pada kasus uji coba di Bikini Atoll oleh Amerika Serikat pada Maret 1954 yang meledakkan kekuatan nuklir hingga 15 megaton. Kapal nelayan Jepang secara tidak sengaja terkontaminasi radioaktif, menyebabkan seluruh awak menjadi sakit. Atau ketika sisa uji coba bom hidrogen Uni Soviet menjadi hujan radioaktif yang jatuh di Jepang. Bahaya dari radioaktif adalah dapat menyebabkan kerusakan genetis bagi manusia dan mencemari lingkungan.

Usaha untuk menegosiasikan perjanjian internasional demi mengakhiri uji coba nuklir dimulai pada bulan Mei 1955 oleh *Subcommittee of Five* dari Komisi Pengurangan Senjata PBB, yaitu Inggris Raya, Amerika Serikat, Kanada, Perancis, dan Uni Soviet, tepatnya ketika Uni Soviet memasukkan kondisi untuk menghentikan percobaan senjata dalam proposalnya. Kepentingan publik ikut berperan aktif dalam mendorong kesepakatan ini. Melalui proposal, pernyataan pribadi, maupun pertemuan internasional, pemerintah terus berupaya mendorong larangan ini. Setelah puluhan resolusi yang ditawarkan, ketiga negara pemilik senjata nuklir saat itu, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris memulai pertemuan selama 10 hari. Dimulai pada 15 Juli hingga 25 Juli 1963 dan akhirnya perjanjian berhasil ditandatangani di Moskow pada 5 Agustus 1963. Perjanjian ini diratifikasi oleh 116 negara termasuk mereka yang berpotensi senjata nuklir (Argentina, Brazil, India, Israel, Pakistan, dan Afrika Selatan), kecuali China dan Perancis.

4. *Outer Space Treaty* (1967)

Perkembangan dunia roket pada tahun 1957 mendorong Amerika Serikat untuk mengusulkan verifikasi internasional terhadap uji coba benda angkasa, sebagai bagian dari usulan negara-negara Barat dalam upaya proses pengurangan senjata yang menginginkan

adanya sistem pemeriksaan di luar angkasa. Sekali lagi Uni Soviet menolak usulan ini karena disaat yang bersamaan mereka sedang bersiap-siap menguji coba ICBM dan meluncurkan satelit pertama bumi. Antara tahun 1959 hingga 1962 negara barat terus berupaya mengusulkan agar proyek militer luar angkasa memiliki batasan-batasan. Salah satu usulan utama mereka adalah adanya larangan penempatan dan pengorbitan senjata pemusnah massal di luar angkasa. Bahkan pada tanggal 22 September 1960 Presiden Eisenhower mengusulkan kepada Sekjen Majelis Umum adanya perluasan *Antarctic Treaty* untuk ikut mengatur luar angkasa dan benda-benda angkasa.

Keinginan Uni Soviet tidak jauh berbeda dengan keinginan Amerika Serikat namun dengan beberapa tambahan syarat, antara lain agar Amerika Serikat melucuti pangkalan-pangkalan militer luar negerinya dari peluru kendali jarak dekat dan jarak menengah. Uni Soviet berpendapat agar tidak ada pembedaan isu pelarangan senjata di luar angkasa dengan penempatan senjata di pangkalan-pangkalan militer luar negeri. Negara barat menolak dengan alasan ketakutan akan berubahnya keseimbangan dunia dan ikut melemahkan keamanan negara-negara barat.

Pasca aktifnya *Limited Test Ban Treaty* (LTBT) pada tanggal 10 Oktober 1963, Uni Soviet mengubah pandangannya dan menerima bahwa senjata di luar angkasa dan di pangkalan militer negara lain adalah hal yang berbeda. Kedua negara kemudian sepakat bahwa tidak boleh ada kekuatan nuklir yang diorbitkan ke ruang angkasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet mengajukan rancangan tambahan masing-masing pada tanggal 16 Juni 1966. Usulan Amerika Serikat hanya melingkupi benda-benda angkasa, sementara Uni Soviet melingkupi seluruh lingkungan dan aspek di luar angkasa. Amerika Serikat setuju dengan rancangan Uni Soviet yang kemudian disahkan oleh Sekjen PBB pada tanggal 19 September 1966.

Konsep dari perjanjian ini tidaklah jauh berbeda dengan *Antarctic Treaty* yang berusaha mencegah kehadiran bentuk kompetisi kolonialisme yang baru dan kerusakan yang diakibatkan dari eksploitasi individu negara tertentu. Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris meratifikasi perjanjian ini sebelum akhirnya ikut diratifikasi oleh 95 negara. Inti dari perjanjian ini adalah larangan untuk (1) penempatan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal di garis orbit sekitar bumi, (2) pemasangan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal di bulan, benda-benda angkasa lainnya, atau di luar angkasa, dan (3) penggunaan bulan atau benda-benda angkasa lainnya untuk tujuan militer, termasuk percobaan senjata apapun.

5. *Latin America Nuclear Free Zone Treaty* (1967)

Perjanjian ini lebih dikenal dengan sebutan *Treaty of Tlatelolco* karena ditandatangani di Tlatelolco, sebuah distrik di Mexico City pada 14 Februari 1967. Perjanjian ini melarang negara Amerika Latin untuk mendapatkan atau memiliki senjata nuklir, termasuk menyimpan atau memasangnya di wilayah mereka untuk negara lain. Selain perjanjian bagi negara-negara Amerika Latin, terdapat dua tambahan protokol bagi negara non Amerika Latin. Protokol I untuk negara non Amerika Latin yang memiliki wilayah di zona bebas nuklir. Protokol II bagi negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat masuk ke dalam kedua protokol, sementara Uni Soviet hanya pada Protokol II.

Amerika Serikat memang menginginkan adanya wilayah bebas senjata nuklir dimana terdapat pembatasan penyebaran senjata nuklir, tidak akan mengganggu perjanjian keamanan yang telah ada, ketentuannya memungkinkan untuk diverifikasi, inisiatif pendiriannya berasal dari wilayah itu sendiri, dan semua negara di wilayah tersebut turut serta. Gambaran ini didapatkan dari usulan Uni Soviet bagi wilayah Eropa Tengah dan wilayah lainnya yang tidak memenuhi kriteria ini, sehingga ditolak Amerika Serikat.

Walaupun sejak awal Amerika Serikat mendukung sekaligus mendorong negara Amerika Latin dalam perjanjian ini.

6. *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (1968)

Nuclear Non-Proliferation Treaty atau yang lebih sering disebut NPT merupakan salah satu perjanjian internasional terpenting yang membatasi nuklir. Tujuan NPT adalah untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi mempersenjatainya, mempromosikan kerjasama demi penggunaan nuklir yang bertujuan damai, dan mencapai pelucutan senjata nuklir secara utuh dan menyeluruh. NPT mengikat negara-negara nuklir yang diakui dalam bentuk perjanjian multilateral. Perundingan yang dimulai sejak tahun 1968 mulai diberlakukan pada tahun 1970. NPT adalah salah satu perjanjian pembatasan senjata yang paling banyak diratifikasi, hingga 187 negara.

Perjanjian yang ditandatangani awalnya oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris ini mengakui Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Perancis dan China sebagai negara nuklir, dan kelima negara tersebut bersedia untuk membatasi penyebaran kemampuan nuklir mereka sambil terus mengupayakan pengurangan kekuatan nuklir mereka secara signifikan.. Sementara bagi negara-negara non-nuklir mereka setuju untuk tidak memiliki senjata nuklir. Negara yang menggunakan nuklir bukan sebagai senjata harus bersedia untuk menerima inspeksi *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dari PBB ke fasilitas nuklir mereka. Negara-negara juga diperbolehkan untuk mengadakan pertukaran nuklir untuk tujuan damai. India, Pakistan, Israel, dan Kuba adalah negara yang tidak ikut meratifikasi perjanjian ini.

7. *Seabed Treaty* (1971)

Seperti halnya *Antarctic Treaty* dan *Outer Space Treaty*, *Seabed Treaty* bertujuan untuk menjauhkan konflik internasional dan senjata nuklir dari daerah yang belum terganggu oleh keberadaan mereka. Hal ini dimulai dengan kemajuan teknologi

oseanografi yang meningkatkan ketertarikan kepada sumber daya alam baru yang masih belum terjemah di laut dalam. Seiring dengan ketertarikan tersebut dikhawatirkan akan muncul berbagai konflik akibat tidak adanya peraturan dan hukum yang begitu jelas. Ketakutan juga muncul jika ada negara yang menggunakan laut dalam sebagai instalasi militer, apalagi jika ada unsur senjata nuklir didalamnya.

Melalui proposal yang diajukan Duta Besar Pardo dari Malta ke Sekjen PBB pada Agustus 1967, Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1967 mengesahkan komite ad hoc untuk mempelajari cara menjaga laut dalam demi tujuan damai, sesuai dengan yang tertuang dalam Piagam PBB. Dalam pesannya pada 18 Maret 1969, Presiden Nixon meminta agar delegasi Amerika berusaha mencari faktor-faktor yang dibutuhkan agar perjanjian internasional dapat melarang penempatan senjata pemusnah massal di laut dalam dan dasar laut demi mencegah dimulainya perlombaan senjata.

Perjanjian multilateral antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris yang diikuti oleh 84 negara lain ini melarang penempatan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya di dasar laut dengan batasan 12 mil laut. Para negara penandatangan perjanjian ini memiliki hak mengamati semua aktifitas di laut dalam negara penandatangan lainnya. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 11 Februari 1971 dan mulai diberlakukan pada tanggal 18 Mei 1972.

8. *Strategic Arms Limitation Treaty I (1972)*

SALT I adalah bagian pertama dari Strategic Arms Limitation Talks yang dimulai dari November 1966 hingga Mei 1972. Selama masa ini Amerika Serikat dan Uni Soviet menegosiasikan pembatasan dan pengendalian beberapa persenjataan utama masing-masing negara. Negosiasi ini menghasilkan dua dokumen yakni *Anti-Ballistic Missile Treaty* dan *Interim Agreement on The Limitation of Strategic Offensive Arms*. Keduanya ditandatangani pada tanggal 26 Mei 1972.

Dalam *Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems*, dibahas soal bagaimana mengakhiri persaingan sistem pertahanan kedua negara yang perlahan telah berubah konsep menjadi sistem penyerangan. Sementara dalam *Interim Agreement on Certain Measures With Respect to the Limitation of Strategic Offensive Arms*, kedua negara sepakat untuk saling mengetahui kekuatan kemampuan senjata nuklir bawah tanah dan laut dalam mereka.

Dalam pertemuan di Moskow akhirnya babak pertama SALT berhasil diselesaikan pada tanggal 26 Mei 1972, tepatnya dua setengah tahun setelah dimualinya negosiasi. Dihasilkan kesepakatan dalam bentuk *ABM Treaty* dan *Interim Agreement on Strategic Offensive Arms*. Isi dari kesepakatan sementara ini adalah tidak melakukan lagi penambahan peluru kendali balistik yang jumlahnya sama sejak tahun 1972. Penambahan silo ICBM juga dilarang, kecuali peluncurnya yang boleh diperbaharui selama dalam spesifikasi dimensi yang disepakati. Perjanjian ini ditandatangani oleh Presiden Nixon dan Sekjen Brezhnev.

9. *Anti-Ballistic Missile Treaty* (1972)

Dalam *Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems*, Amerika Serikat dan Uni Soviet menyepakati agar hanya ada dua wilayah yang menjadi tempat peluncuran ABM. Tempatnya harus saling berjauhan sehingga tidak mampu melindungi seluruh wilayah negara atau menjadi pusat peluncuran mandiri. Pada akhirnya kedua negara berada dalam kondisi yang sama, terancam terkena serangan balasan jika memulai serangan.

Perjanjian ini hanya mengizinkan setiap negara memiliki satu sistem ABM untuk melindungi ibukota negara masing-masing dan satu lagi untuk melindungi lokasi peluncuran ICBM. Kedua lokasi yang dilindungi harus berjarak tidak kurang dari 1.300 km. yang tujuannya agar tidak ada yang memiliki sistem pertahanan yang betul-betul

efektif mampu melindungi seluruh wilayah. Diberikan juga batasan bagi jumlah dan kemampuan roket ABM yang boleh disediakan. Dalam setiap lokasi tidak boleh memiliki lebih dari 100 roket penghadang termasuk peluncurnya. Penyediaan radar pengintai termasuk karakteristiknya juga dibahas dan menjadi salah satu pembahasan teknis paling rumit. Semuanya tercantum jelas dalam perjanjian ini, dan berbagai tambahan susulan akan dikeluarkan oleh persetujuan masing-masing negara.

Kedua negara setuju untuk membatasi pengembangan kualitatif teknologi ABM mereka melalui larangan pengembangan, uji coba, atau peletakan peluncur roket yang mampu meluncurkan lebih dari satu roket termasuk modifikasi untuk memiliki kemampuan tersebut. Penambahan kecepatan sistem pengisian ulang peluncur roket dan penambahan kemampuan roket untuk menembak beberapa target sekaligus juga dilarang. Akibat kekhawatiran atas kemungkinan roket anti udara (surface-to-air missiles atau SAMs) akan dimodifikasi untuk mampu menghalau ICBM ataupun SLBM, maka perjanjian ini juga ikut melarangnya. Namun, untuk pengembangan kemampuan radar tidak dilarang selama radar ditempatkan di wilayah terluar masing-masing negara.

Kedua negara pada akhirnya menyepakati agar tidak diperbolehkannya ada pengembangan, uji coba, atau pemasangan sistem ABM dasar laut, udara, luar angkasa, dan kendaraan angkut beserta seluruh komponennya. Jika kelak di masa depan teknologi mengharuskan sistem ABM yang baru maka akan dibahas kemudian sesuai dengan kesepakatan awal dalam perjanjian. Pengawasan perjanjian yang mulai aktif pada tanggal 3 Oktober 1972 ini akan dilakukan oleh *Standing Consultative Commission*. Namun, pada 13 Desember 2001 Presiden George W. Bush mengajukan pengunduran dari perjanjian ini. Pengunduran diri Amerika Serikat secara formal terjadi pada tanggal 13 Juni 2002 yang disusul dengan uji coba ABM di Delta Junction, Alaska.

10. *Threshold Test Ban Treaty* (1974)

The Treaty on the Limitation of Underground Nuclear Weapon Tests, atau juga dikenal sebagai *Threshold Test Ban Treaty* (TTBT) ditandatangani pada bulan Juli 1974. Perjanjian ini membahas ambang batas uji coba kekuatan nuklir yang diperbolehkan. Hasil kekuatan ledakan tidak boleh lebih dari 150 kiloton atau sekitar 150.000 ledakan TNT. Selama tahun 1960, kedua negara sangat aktif melakukan uji coba nuklir yang daya ledaknya melebihi 150 kiloton. Pelarangan ini akan mencegah uji coba kekuatan nuklir dengan kekuatan berlebihan yang turut menghilangkan keberanian salah satu negara melakukan serangan pertama.

Proposal pertama untuk menghentikan uji coba senjata nuklir dibuat pada tahun 1955, namun negosiasi yang efektif membahas pengaturan uji coba nuklir baru terjadi pada tahun 1958 di Jenewa. Hal ini diperkuat dengan turut sertanya Inggris. *The Conference on the Discontinuance of Nuclear Weapon Tests* tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Salah satu masalah utamanya adalah saat itu sulit mencari prosedur verifikasi yang tepat untuk memastikan negara-negara anggota patuh terhadap larangan uji coba senjata nuklir dimanapun tempatnya. Prosedur yang menurut Amerika Serikat dan Inggris diperlukan tapi tidak bagi Uni Soviet.

Amerika Serikat dan Uni Soviet setuju untuk melanjutkan pembahasan lanjutan soal larangan uji coba nuklir pada tahun 1974. Maka diutuslah kelompok ahli dari Amerika Serikat ke Moskow untuk membicarakan hal-hal teknis. Kesepakatan dicapai pada bulan Juli 1974 dalam pertemuan di Moskow. Perjanjian ini mencakup protokol yang menjelaskan data teknis secara detail yang boleh dipertukarkan dan keterangan soal bentuk senjata dan lokasi uji coba untuk mempermudah verifikasi. Data-data yang dipertukarkan antara lain informasi batas geografis dan geologi lokasi uji coba, sehingga akan mempermudah dalam pengukuran sinyal seismik atau getaran ledakan di bawah tanah.

Kesepakatan untuk bertukar data secara mendetail menggambarkan kerjasama langsung kedua negara dalam mengendalikan kekuatan nuklir. Ini menjadi yang pertama kalinya bagi kedua negara sepakat untuk menunjukkan data uji coba senjata nuklir masing-masing. Salah satu masalah teknis yang kemungkinan akan terjadi kemudian dikemukakan oleh Uni Soviet pada tahun 1974. Kekhawatiran jika misalnya terjadi kesalahan kecil, sebuah ketidaksengajaan dalam kalkulasi yang menyebabkan ledakan melebihi perkiraan dan ambang batas yang ditetapkan. Kedua negara kemudian menyepakati dua hal, yaitu satu atau dua ketidaksengajaan dari kalkulasi yang meleset dalam satu tahun tidak akan dianggap sebagai pelanggaran dan jika sampai terjadi hal demikian maka salah satu pihak boleh menuntut untuk dilakukan konsultasi dua arah.

Meskipun TTBT ditandatangani pada tahun 1974, namun baru dikirimkan ke Senat Amerika Serikat untuk diberi saran dan pandangan sebelum diratifikasi pada bulan Juli 1976. Alasan terkatung-katungnya perjanjian ini karena juga ditunggunya *Peaceful Nuclear Explosion Treaty* (PNET) yang pembahasannya juga selesai di tahun yang sama. Harus diketahui bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet pada akhirnya tidak pernah selesai meratifikasi perjanjian ini, walaupun pada tahun yang sama kedua negara masing-masing mengumumkan keinginan untuk membahas ulang ambang batas 150 kiloton.

Negosiasi dilanjutkan kembali pada November 1987 untuk mencapai kesepakatan beberapa verifikasi tambahan yang memungkinkan Amerika Serikat untuk meratifikasinya kini. Semua verifikasi tambahan, protocol baru, dan tambahan lainnya akhirnya disepakati pada bulan Juni 1990. TTBT dan PNE Treaty yang diselesaikan bersamaan akhirnya mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 1990. Dicapai kesepakatan toleransi kelebihan ledakan hingga 50 kiloton, sesuai dengan yang tercatat secara seismic dan kelebihan 35 kiloton dalam inspeksi langsung.

11. Pernyataan bersama Amerika Serikat-Uni Soviet, 24 November 1974 (Kesepakatan Vladivostok)

Dalam rapat kerja di wilayah Vladivostok pada tanggal 23-24 November 1974, Sekertaris Jenderal Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet L. I. Brezhnev dan Presiden Amerika Serikat Gerald R. Ford membahas secara detail masalah untuk membatasi senjata strategis secara lebih lanjut. Mereka menegaskan pentingnya agar kedua negara terikat dalam pembatasan ini. Keyakinan yang dilandasi pemahaman bahwa kesepakatan jangka panjang akan memperbaiki hubungan kedua negara yang ikut mengurangi ketegangan bahaya perang dan mendorong perdamaian dunia.

Sekjen Brezhnev dan Presiden Ford merasa pentingnya perjanjian semacam ini ditambah kesepakatan-kesepakatan pendahulunya (*Interim Agreement* 26 Mei 1972), maka mereka menyimpulkan keinginan untuk pembatasan dalam jangka yang panjang hingga tahun 1985. Kedua pemimpin ini kemudian menyepakati akan dilakukan negosiasi lanjutan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian baru akan disatukan dengan *Interim Agreement* yang aktif hingga oktober 1977.
- b. Perjanjian baru akan melingkupi Oktober 1977 hingga 31 Desember 1985.
- c. Batasan yang akan disepakati adalah jumlah kendaraan angkut strategis dan ICBM dan SLBM yang dilengkapi hulu ledak independen.
- d. Perjanjian baru akan mencakup ketentuan untuk negosiasi lebih lanjut yang dimulai selambat-lambatnya tahun 1980-1981 soal pembahasan pembatasan dan pengurangan senjata strategis pasca periode 1985.
- e. Negosiasi antar delegasi Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk membahas perjanjian baru yang akan melanjutkan perjanjian sebelumnya akan dilaksanakan di Jenewa pada Januari 1975.

12. *Peaceful Nuclear Explosions Treaty* (1976)

Selama mempersiapkan *Threshold Test Ban Treaty* pada bulan Juli 1974, Amerika Serikat dan Uni Soviet menyadari diperlukannya kesepakatan yang sesuai untuk menetapkan ledakan nuklir bawah tanah untuk tujuan damai. Meskipun tidak terdapat perbedaan penting antara teknologi peledakan nuklir untuk senjata dan untuk tujuan damai. Negosiasi kesepakatan *Peaceful Nuklir Explosions* yang akan diatur dalam *Article III Threshold Test Ban Treaty* dibahas mulai 7 Oktober 1974 di Moskow. Setelah 6 sesi negosiasi yang berbeda dalam kurun 18 bulan akhirnya dihasilkan *Treaty on Underground Nuclear Explosions for Peaceful Purposes* pada bulan April 1976. Isi dari kesepakatan ini mengandung sebuah perjanjian, protokol detail untuk perjanjian tersebut, dan kesepakatan bersama dalam menentukan apakah sebuah aktifitas nuklir bertujuan damai seperti yang tercantum dalam perjanjian atau tidak.

Perjanjian ini mengatur segala bentuk ledakan nuklir yang terjadi di luar tempat uji coba yang telah disepakati dalam TTBT. Kedua negara melalui perjanjian ini secara garis besar sepakat untuk tidak melakukan ledakan nuklir tersendiri yang kekuatannya melebihi 150 kiloton, tidak melakukan ledakan nuklir berkelompok atau kumpulan dari ledakan nuklir tersendiri yang berurutan melebihi 1.500 kiloton, tidak melakukan ledakan berkelompok dengan kekuatan melebihi 150 kiloton kecuali dapat diukur dan diidentifikasi oleh prosedur verifikasi yang disepakati, dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam LTBT 1963. Kedua negara juga berhak melakukan uji coba ledakan nuklir dalam tujuan damai di wilayah negara lain jika diharuskan, selama mematuhi batasan ledakan dan ketentuan dalam PNE Treaty dan NPT.

PNE Treaty dan TTBT seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memasuki Senat pada 28 Juni 1990 yang disusul persetujuan Senat. Pertukaran instrument ratifikasi kedua negara dilakukan sebelum akhirnya perjanjian ini aktif pada 11 Desember 1990. Komisi

Konsultasi Bersama didirikan untuk mendiskusikan berbagai pertanyaan demi mengembangkan detail yang dibutuhkan dalam inspeksi dan untuk memfasilitasi kerjasama di berbagai wilayah yang saling menguntungkan.

13. *Environmental Modification Convention* (1977)

Dalam pertemuan tingkat tinggi di Moskow pada bulan Juli 1974, Presiden Nixon dan Sekjen Brezhnev setuju untuk mengadakan diskusi bilateral untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan dalam mencegah teknik modifikasi lingkungan untuk tujuan militer. Tiga kali pertemuan diadakan pada tahun 1974 dan 1975 yang menghasilkan kesepakatan dalam masalah ini. Tindak lanjutnya adalah pada bulan Agustus 1975, ketika perwakilan Amerika Serikat dan Uni Soviet di Konferensi *Committee on Disarmament* (CCD) bertemu dan diajukan rancangan teks dari *Convention on the Prohibition of Military or any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques* (Konvensi Pelarangan Penggunaan Kekuatan Militer atau Kekuatan Berbahaya Lain dari Teknik Modifikasi Lingkungan). Konvensi ini kemudian mendefinisikan bahwa teknik modifikasi lingkungan adalah mengubah (melalui manipulasi proses alami yang disengaja) dinamika, komposisi, atau struktur dari bumi, termasuk biota, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, atau luar angkasa. Perubahan cuaca atau pola iklim pada ombak lautan, atau lapisan ozon dan ionosfer, atau pengacauan keseimbangan ekologis pada suatu wilayah yang diakibatkan dari teknik modifikasi lingkungan.

Negosiasi terus dilaksanakan di CCD hingga pertengahan tahun 1976 yang menghasilkan naskah yang diperbaharui dengan penjelasan empat artikel didalamnya. Perjanjian ini kemudian dikirimkan kepada Sekjen PBB untuk dijadikan pertimbangan. Artikel I menjelaskan komitmen dasar bahwa, “setiap negara peserta Konvensi ini diwajibkan tidak terlibat dalam penggunaan kekuatan militer atau kekuatan berbahaya

lainnya dari teknik modifikasi lingkungan dengan dampak yang parah, dalam jangka waktu panjang dan tersebar luas yang dimaksudkan untuk merusak, merugikan atau melukai negara peserta lain”. Sehubungan dengan penggunaan untuk tujuan damai teknik modifikasi lingkungan, Konvensi memberi hak bagi para pesertanya untuk ikut berperan dalam pertukaran informasi keilmuan dan teknologi.

Pada sesi musim gugur tahun 1976, Majelis Umum PBB mengadakan perdebatan rancangan Konvensi yang dikaitkan dengan beberapa resolusi. Akhirnya dicapai kesepakatan agar hasil Konvensi dibuka dan Sekjen PBB mempersilahkan negara-negara untuk ikut memberi pandangan, menandatangani dan meratifikasi. Sekjen PBB meresmikannya dalam sebuah upacara di Jenewa pada 18 Mei 1978. Amerika Serikat beserta 33 negara menandatangani Konvensi ini yang akan aktif pada 5 Oktober 1978, ketika 20 negara telah memasukkan instrument ratifikasi mereka. Khusus bagi Amerika Serikat, Konvensi ini harus melalui senat sehingga baru diratifikasi oleh Presiden Carter pada 13 November 1979. Amerika Serikat menjalankan isi Konvensi ini pada 17 Januari 1980 setelah memasukkan instrument ratifikasi ke PBB.

14. *Strategic Arms Limitation Treaty II* (1979)

Tujuan utama dari SALT II adalah untuk menggantikan *Interim Agreement* dengan perjanjian komprehensif yang jangka waktunya lebih panjang dan menyediakan batasan lebih luas bagi sistem persenjataan strategis. Tujuan yang terpenting bagi Amerika Serikat ketika dimulainya SALT II adalah menyediakan bagi kedua negara jumlah kendaraan pengangkut senjata yang setara sebelum akhirnya dimulai proses pengurangannya. Kemudian selanjutnya dilakukan pelarangan pengembangan secara kualitatif yang dapat mengancam stabilitas masa depan. Pada diskusi awal Amerika Serikat dan Uni Soviet difokuskan kepada pembahasan sistem senjata, menyediakan faktor yang mendukung kesetaraan jumlah kendaraan pengangkut nuklir, perbedaan mendasar kekuatan kedua

negara, pelarangan sistem senjata baru, memberi batasan kualitatif, dan tawaran Uni Soviet untuk ikut dalam sistem markas militer luar negeri Amerika Serikat. Posisi kedua negara memiliki perbedaan sangat jauh dalam isu-isu ini.

Pencapaian besar terjadi dalam pertemuan di Vladivostok, November 1974. Seperti yang telah dibahas sebelumnya akhirnya pertemuan ini menjadi kerangka dasar bagi kesepakatan SALT II. Dalam Aide-Memoire yang ikut merekam kesepakatan ini berisi:

- a. 2.400, batasan jumlah agregat kendaraan pengangkut nuklir kedua negara, termasuk ICBM, SLBM, dan pesawat pengebom)
- b. 1.320, batasan jumlah agregat sistem MIRV
- c. Larangan pembangunan peluncur ICBM baru
- d. Batas pemasangan senjata strategis baru
- e. Unsur penting Interim Agreement akan dimasukkan ke dalam perjanjian baru ini.

Sebagai tambahan, Aide-Memoire menyatakan durasi perjanjian baru ini akan melewati tahun 1985.

Kesepakatan SALT II yang telah rampung ditandatangani oleh Presiden Carter dan Sekjen Brezhnev di Vienna pada tanggal 18 Juni 1979. Presiden Carter kemudian mengirimkannya ke Senat pada tanggal 22 Juni untuk dipertimbangkan. Namun pada tanggal 30 Januari 1980 Presiden Carter meminta agar perjanjian tersebut ditunda pertimbangannya karena invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Perjanjian ini memang belum diratifikasi, tapi kedua negara telah terikat dalam hukum internasional untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan mengacaukan tujuan dari perjanjian ini. Kecuali kedua negara sepakat untuk tidak menjadi anggota lagi dalam perjanjian ini.

Presiden Carter mengumumkan pada tahun 1980 bahwa Amerika Serikat akan menaati isi perjanjian selama Uni Soviet juga melakukan hal yang sama. Sekjen Brezhnev

juga melakukan hal yang sama soal keinginan Uni Soviet. Kemudian hal yang sama terjadi lagi pada bulan Mei 1982 ketika Presiden Reagan mengatakan tidak akan merendahkan perjanjian ini jika Uni Soviet tetap membatasi dirinya. Uni Soviet sendiri tetap mematuhi perjanjian yang belum diratifikasi ini. Hingga akhirnya tahun 1984 dan 1985 Presiden Reagan mengumumkan bahwa Uni Soviet telah melanggar komitmen politiknya untuk menghormati SALT II. Namun, Presiden Reagan tetap menganggap bahwa hubungan antar kedua negara dalam perjanjian ini masih sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat. Maka pada bulan Juni 1985, Presiden Reagan mengumumkan akan tetap menjaga perjanjian ini selama Uni Soviet tetap melakukan pengendalian yang sebanding dan dengan ketentuan bahwa Uni Soviet ikut aktif dalam perjanjian pengurangan senjata pada *Nuclear and Space Talks* di Jenewa .

Presiden Reagan pada 26 Mei 1986 menjelaskan bahwa Uni Soviet sama sekali tidak memenuhi komitmen politiknya untuk menghormati perjanjian-perjanjian SALT. Uni Soviet juga tidak memperlihatkan kesiapannya dalam kerangka kerjasama. Presiden Reagan menganggap tidak ada peningkatan berarti dalam senjata strategis Amerika Serikat, dengan asumsi ancaman tidak akan bertambah lagi maka tidak diperlukannya lagi penambahan jumlah senjata dan jumlah peluncur maupun pengangkutnya. Namun Amerika Serikat akan terus melakukan pengendalian sambil tetap menjaga kondisi strategis deterrence dan meminta agar Uni Soviet ikut dalam pembahasan kerangka kerjanya. Maka dengan ini Amerika Serikat meninggalkan komitmen politiknya dalam SALT II.

15. *South Pacific Nuclear Free Zone Treaty* (1985)

Ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 1985 di pulau Rarotonga, Cook Islands, maka perjanjian ini juga disebut sebagai *Treaty of Rarotonga*. Perjanjian ini termasuk jenis perjanjian multilateral seperti *Treaty of Tlatelolco* yang disepakati oleh negara-

negara Pasifik Selatan yang intinya melarang uji coba, pengembangan, dan penempatan nuklir, dan pembuangan sampah nuklir di wilayah ini. Luas wilayah ini meliputi pantai barat Australia hingga wilayah bebas nuklir Amerika Selatan, 60 derajat dari khatulistiwa.

Tiga hal utama yang dibahas dalam perjanjian ini mencakup 3 protokol, yaitu:

- a. Meminta agar negara yang memiliki wilayah di Pasifik Selatan agar tidak mengembangkan, menyimpan, atau pun menguji coba nuklir di wilayah ini
- b. Meminta agar 5 negara nuklir tidak menggunakan ancaman untuk menggunakan kekuatan nuklir kepada negara anggota perjanjian wilayah ini.
- c. Meminta 5 negara nuklir agar tidak menguji coba ledakan nuklir dalam wilayah ini.

Pada tahun 1996, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian ini yang disusul ratifikasi Perancis dan Inggris. Amerika Serikat telah memasukkannya sebagai pertimbangan pada senat tapi belum diratifikasi hingga kini. China dan Uni Soviet hanya meratifikasi Protokol II dan III.

16. *Intermediate-Range nuclear Forces Treaty* – INF (1987)

Perjanjian ini adalah perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk memusnahkan peluru kendali jarak jauh dan jarak dekat yang diluncurkan dari darat dan juga rudal jelajah dengan kemampuan jarak mencapai 500 hingga 5.500 km. Selain itu, seluruh peluncur dan bangunan serta perlengkapan yang mendukungnya juga harus dimusnahkan dalam waktu 3 tahun setelah perjanjian mulai berlaku. Perjanjian ini merupakan perjanjian pertama yang benar-benar mengurangi senjata nuklir, bukannya membatasi saja.

Uni Soviet pada pertengahan tahun 1970an Uni Soviet telah berhasil mencapai keseimbangan strategis yang masih kasar soal jumlah nuklirnya dengan Amerika Serikat. Tidak menunggu lama Uni Soviet kemudian mulai mengganti peluru kendali jarak menengah SS-4 dengan SS-5 yang baru. Selain itu, kehadiran SS-20 memberi ancaman

keamanan bagi Eropa. SS-20 adalah peluru kendali yang memiliki mobilitas tinggi, akurat dan dapat disembunyikan dan dipasang kembali dengan cepat. Peluru kendali ini dapat mengangkut hingga 3 hulu ledak independen dan memiliki jarak tempuh hingga 5.000 km atau bisa menjangkau Eropa Barat, Afrika Utara, Timur Tengah. Jika diluncurkan dari markasnya di wilayah timur Uni Soviet maka dapat menjangkau hampir seluruh Asia, Asia Tenggara, dan Alaska.

Perjanjian INF ditandatangani oleh Presiden Reagan dan Sekjen Brezhnev pada tanggal 8 Desember 1987 dalam pertemuan di Washington. Pada saat penandatanganannya, perjanjian ini merupakan perjanjian dengan verifikasi paling detail dan keras dalam sejarah pengendalian senjata nuklir, yang didesain untuk menghancurkan semua sistem INF dalam tiga tahun dan menjamin kepatuhan dalam pelarangan total kepemilikan dan penggunaan peluru kendali ini. Perjanjian ini dinilai berhasil ketika Amerika Serikat pada akhir April dan awal Mei 1991 menghancurkan peluru kendali dan rudal jelajahnya yang ikut di dalam perjanjian ini. Uni Soviet sendiri menghancurkan SS-20 terakhirnya pada tanggal 11 Mei 1991. Total 2.692 peluru kendali yang dimusnahkan semenjak perjanjian ini diberlakukan.

Amerika Serikat mendorong perjanjian ini menjadi perjanjian multilateral pada tanggal 25 Desember 1991, atau ketika Uni Soviet bubar. Targetnya adalah 12 negara-negara bekas Uni Soviet. Belarusia, Kazakhstan, Rusia, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan adalah negara yang diketahui memiliki fasilitas INF di wilayahnya. Dari enam negara ini, Belarusia, Kazakhstan, Rusia, dan Ukraina menjadi negara yang ikut aktif dalam menjalankan perjanjian ini.

17. *Ballistic Missile Launch Notification Agreement* (1988)

Kesepakatan Pemberitahuan Peluncuran ICBM dan SLBM ditandatangani pada Pertemuan Moskow tahun 1988. Perjanjian ini menggambarkan keinginan kedua negara

dalam mengurangi resiko perang nuklir akibat salah informasi, salah perhitungan, atau hanya karena kecelakaan. Sejumlah kesepakatan sebelumnya telah membahas soal pemberitahuan peluncuran senjata balistik, misalnya:

- a. *Accidents Measures Agreement* tahun 1971 yang meminta agar kedua negara memberitahukan negara lain jika ada peluru kendali yang harus melewati wilayah masing-masing.
- b. *Incidents at Sea Agreement* tahun 1972 yang meminta agar dilakukan pemberitahuan kepada penerbang atau marinir jika terjadi kondisi berbahaya bagi navigasi atau penerbangan pesawat. Ketika melakukan peluncuran senjata ke wilayah internasional yang diketahui berbahaya dan masuk ke dalam perjanjian ini maka harus dikeluarkan pemberitahuan sebelumnya agar wilayah tersebut dijaui.
- c. Atikel XVI dari SALT II, yang tidak pernah diratifikasi sebenarnya akan membuat masing-masing negara untuk saling memberitahukan sebelum melakukan peluncuran ICBM yang melewati wilayah negara masing-masing. Tapi tidak menjadi kewajiban jika dilakukan di dalam wilayah masing-masing. Penjelasan soal peluncuran SLBM juga tidak ada dalam SALT II.

Dari semua perjanjian yang telah disebutkan tidak ada yang betul-betul melingkupi seluruh peluncuran senjata strategis ICBM dan SLBM. Presiden Reagan mengusulkan pada tahun 1982 agar dilakukan langkah-langkah untuk membahas pembangunan kepercayaan pada pembahasan START. Diantara usulan ini adalah pemberitahuan awal peluncuran ICBM dan SLBM. Selama negosiasi START kedua negara memberi catatan soal prosedur pemberitahuan peluncuran yang akan dimasukkan dalam konsep bersama naskah perjanjian START.

Sebagai langkah dalam membangun kepercayaan, pada bulan Mei 1988 Amerika Serikat mengusulkan kepada Uni Soviet untuk menyimpulkan perjanjian terpisah yang menuntut pemberitahuan tingkat lanjutan dalam peluncuran SLBM dan ICBM. Uni Soviet menyetujui ide Amerika Serikat yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Agreement on Notifications of ICBM and SLBM Launches* pada 31 Mei 1988 di Moskow. Penandatanganan dilakukan oleh Menlu Amerika Serikat George P. Schultz dan Menlu Uni Soviet Eduard Shevardnadze. Kesepakatan ini menetapkan bahwa pemberitahuan dilakukan kurang dari 24 jam sebelumnya, dengan data perencanaan, wilayah peluncuran, dan wilayah yang akan dijatuhkan uji coba ICBM dan SLBM. Ditambahkan juga soal pemberitahuan harus melalui Pusat Pengurangan Resiko Nuklir.

Setelah INF Treaty, START I ditandatangani pada tahun 1991. Perjanjian ini berisi kewajiban untuk memberitahu semua jenis peluncuran ICBM dan SLBM, termasuk yang digunakan untuk peluncuran ke atmosfer atau luar angkasa. Sebagai tambahan dalam isi perjanjian INF Treaty soal pemberian data lengkap, START I menuntut kedua negara menyebutkan frekuensi siaran telemetri yang digunakan, jenis modulasi dan apakah peluncuran menggunakan kode tertentu (enkapsulasi dan enkripsi).

18. *Strategic Arms Reduction Treaty* (1991)

START merupakan perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang jika diratifikasi maka akan membatasi kedua negara hanya boleh memiliki 1.600 kendaraan angkut nuklir dan 6.000 hulu ledak. Perjanjian ini berhasil mengurangi jumlah hulu ledak nuklir jarak jauh Amerika Serikat hingga 15% dan Uni Soviet hingga 25%. Kedua negara diizinkan untuk melanjutkan rencana modernisasi, dan akibatnya jumlah hulu ledak yang diproyeksikan ternyata meningkat selama tahun 1990an di bawah perjanjian ini.

Segera setelah penandatanganan perjanjian ini, Uni Soviet bubar. Empat negara hasil pecahannya, Rusia, Belarusia, Kazakhstan, dan Ukraina yang memiliki nuklir mendukung perjanjian ini dengan ikut menandatangani Protokol START I. Sebagai akibat dari ikutnya Ukraina dalam NPT, maka perjanjian ini mulai berlaku pada bulan Desember 1994. Belarusia, Kazakhstan, dan Ukraina secara resmi bebas dari kekuatan nuklir pada tahun 2001.

C. Diplomasi Nuklir Pasca Perang Dingin

Bubarnya Uni Soviet membawa perubahan besar dalam bentuk diplomasi nuklir setelahnya. Selama Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi aktor utama dalam setiap pertemuan nuklir akibat politik bipolar. Maka pasca Perang Dingin kepemilikan nuklir menjadi kurang terkendali, menuntut perjanjian menjadi perjanjian multilateral. Hal ini utamanya diakibatkan oleh negara-negara bekas Uni Soviet ternyata juga memiliki nuklir, yang kemudian disusul dengan bertambahnya negara pemilik nuklir melalui perjanjian internasional atau secara rahasia. Berikut adalah 6 diplomasi nuklir yang mengikutsertakan Amerika Serikat dan Rusia sebagai pesertanya hingga ke perjanjian nuklir terbaru yang juga sekaligus akan menjadi pembahasan utama tulisan ini, New START:

1. Strategic Arms Reduction Treaty II (1993)

START II adalah perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Rusia yang ditandatangani oleh Presiden dan Yeltsin pada 3 Januari 1993. Perjanjian ini akan mengurangi kendaraan pengangkut nuklir (peluru kendali balistik dan pesawat *bomber*) dan jumlah hulu ledaknya. Secara umum kekuatan yang akan dikurangi adalah 5.000 hulu ledak, sebagai tambahan dari 9.000 hulu ledak yang dikurangi dibawah START I.

Amerika Serikat dan Rusia harus mengurangi jumlah hulu ledaknya hingga tidak melebihi 4.250 hulu ledak pada tanggal 4 Desember 2001. Hulu ledak yang harus

dimusnahkan termasuk diantaranya hulu ledak di ICBM, SLBM, dan pesawat *bomber*. Hulu ledak yang dipasang pada ICBM di MIRV tidak boleh lebih dari 1.200 hulu ledak, pada SLBM tidak boleh lebih dari 2.160 hulu ledak, dan pada ICBM tidak boleh lebih dari 650 hulu ledak.

Tahapan selanjutnya, pada 31 Desember 2002 kedua negara harus mengurangi jumlah hulu ledaknya tidak melebihi 3.500 hulu ledak. Seperti sebelumnya, termasuk seluruh hulu ledak yang ditempatkan di berbagai kendaraan pengangkut nuklir. Ditambahkan bahkan tidak boleh lagi ada hulu ledak ICBM pada MIRV setelah tahap kedua. Hulu ledak SLBM tidak boleh melebihi 1.750 hulu ledak, tapi tidak ada larangan pada SLBM di MIRV.

Rusia secara formal menarik diri dari START II pada 14 Juni 2002 dengan alasan perjanjian ini sudah berakhir dengan berakhirnya masa perjanjian ABM. Kongres Amerika Serikat meratifikasi perjanjian ini pada tahun 1996 yang diikuti parlemen Rusia pada tahun 2002, tapi anggota parlemen Rusia mengaitkan START II dengan keberadaan ABM Treaty 1972.

2. *African-Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty* (1996)

Perjanjian yang juga dikenal sebagai *Treaty of Pelindaba* ini merupakan perjanjian multilateral yang ditandatangani oleh 49 dari 53 negara anggota Organisasi Uni Afrika. Penandatanganan perjanjian ini berjanji untuk (1) tidak melakukan penelitian, pengembangan, uji coba, atau penyimpanan senjata nuklir, (2) melarang penempatan senjata nuklir di wilayah ini, (3) memelihara standar tinggi dalam menjaga materi nuklir, fasilitas nuklir, dan perlengkapa nuklir, dan (4) melarang pembuangan sampah radioaktif. Perjanjian ini diadakan oleh Komisi Energi Nuklir Afrika.

Kelima negara nuklir ikut menandatangani Protokol I dan Protokol II dari 3 protokol yang ikut dalam perjanjian ini, yaitu:

- a. Dalam Protokol I Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Rusia, dan RRC agar turut serta untuk tidak menggunakan atau mengancam menggunakan kekuatan nuklir bagi negara-negara anggota perjanjian ini atau mereka yang ada dalam wilayah ini sesuai dengan Protokol III
- b. Dalam Protokol II Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Rusia, dan RRC agar turut serta untuk tidak menuji coba atau membantu atau mendorong uji coba nuklir di wilayah ini.
- c. Protokol III hanya terbuka untuk negara dengan wilayah yang dependen di Afrika dan meminta mereka untuk menjaga dan menghormati beberapa ketentuan dalam perjanjian ini. Hanya Spanyol dan Perancis yang berhak untuk masalah ini.

Perjanjian ini penandatangananannya dimulai sejak 11 April 1996 dan mulai berlaku setelah mendapatkan 28 ratifikasi, yaitu pada tanggal 15 Juli 2009. Amerika Serikat dan Rusia menandatangani perjanjian ini pada tahun 1996 tapi belum meratifikasinya. Hillary Clinton pada bulan Mei 2010 mengumumkan bahwa Pemerintahan Obama akan memasukkan perjanjian ini ke Senat. Rusia belum meratifikasinya karena belum jelasnya status Diego Garcia, sebuah pulau di Samudera Hindia. Pulau ini adalah milik Inggris yang dijadikan pangkalan militer oleh Amerika Serikat. Diego Garcia adalah bagian dari Afrika tapi tidak diakui oleh Inggris dan Amerika Serikat.

3. *Comprehensive Test Ban Treaty* (1996)

Secara sederhana, perjanjian ini adalah perjanjian multilateral yang ditandatangani oleh kelima negara nuklir dan 90 negara non nuklir. Perjanjian ini akan melarang semua bentuk uji coba nuklir, besar atau kecil, di atas maupun di bawah permukaan bumi. Perjanjian ini akan mengikutsertakan sistem pemantauan di seluruh dunia, dengan 170 stasiun getaran seismik untuk memeriksa kondisi udara, air dan tanah jika telah terjadi ledakan nuklir.

Dalam penandatanganan dan ratifikasi perjanjian ini terdapat dua kelompok pembagian negara-negara menurut PBB, yaitu Annex 1 yang isinya adalah semua negara anggota PBB, negara Cook Islands, Tahta Suci, dan negara Niue dan Annex 2 yang isinya adalah negara-negara yang hadir dalam *Conference of Disarmament* tahun 1996 dan memiliki kemampuan atau sedang melakukan penelitian reaktor saat itu. Perbedaan dua kelompok ini adalah, negara-negara Annex 1 bisa mengajukan diri menjadi anggota Dewan Eksekutif yang bertugas menjaga, mengambil keputusan dan mengawasi perjanjian ini. Negara-negara ini terikat pada isi perjanjian tapi ratifikasi mereka tidak menentukan berlaku tidaknya perjanjian ini. Sementara Annex 2 adalah negara yang dibutuhkan ratifikasinya sebelum perjanjian ini boleh berlaku.

Total 44 negara yang menjadi Annex 2, yaitu Afrika Selatan, Aljazair, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Austria, Banglades, Belanda, Belgia, Brazil, Bulgaria, Cili, Cina, Finlandia, Hungaria, India, Indonesia, Inggris, Iran, Israel, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Kolombia, Kongo, Korea Utara, Mesir, Meksiko, Norwegia, Pakistan, Perancis, Peru, Polandia, Rumania, Rusia, Slovakia, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, dan Vietnam. Tapi hingga sekarang hanya 3 negara yang tidak menandatangani dan meratifikasi perjanjian ini yaitu India, Pakistan, dan Korea Utara.

4. *Strategic Offensive Reductions Treaty* (2002)

SORT atau juga dikenal sebagai *Treaty of Moscow* adalah perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Rusia dalam pengurangan senjata strategis. Perjanjian ini ditandatangani di Moskow pada 24 Mei 2002 dan aktif setelah ratifikasi sejak 1 Juni 2003 hingga Februari 2011 dan akan kadaluarsa pada 31 Desember 2012 jika tidak digantikan oleh New START. Lima hal utama yang dibahas dalam perjanjian ini adalah:

- a. Amerika Serikat dan Rusia akan membatasi jumlah hulu ledak nuklir antara 1.700 hingga 2.200 hulu ledak

- b. Batasan ini harus terpenuhi pada tahun 2012
 - c. Masing-masing negara dapat mundur dari perjanjian ini dalam tiga bulan dengan mengutip kepentingan nasional utama negara
 - d. Prosedur verifikasi pada START I, seperti inspeksi langsung akan berlaku bagi perjanjian ini meskipun tidak terbahasakan dalam isi perjanjian. Akan dibentuk komisi bersama untuk membahas pengimplementasiannya.
 - e. Perjanjian ini membolehkan kedua negara untuk bebas melakukan apa yang akan terjadi dengan hulu ledak mereka. Hulu ledak tersebut tidak harus dihancurkan.
5. *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (2005)

Konvensi ini merupakan kesepakatan internasional melawan terorisme nuklir yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada April 2005. Tujuan dari konvensi ini adalah untuk mengembangkan kerangka kerja global yang legal dalam menghadapi ancaman teroris. Perjanjian ini penandatanganannya dimulai sejak September 2005. Berdasarkan instrumen yang awalnya dikirim oleh Rusia pada tahun 1998, konvensi ini menyediakan definisi bagi tindakan terorisme nuklir dan melingkupi batasan luas yang memungkinkan menjadi target, misalnya saja mereka yang menolak keberadaan pembangkit listrik nuklir atau reaktor nuklir.

Berdasarkan ketentuan, mereka yang terbukti melanggar dapat di ekstradisi atau dihukum di tempat. Konvensi ini juga mendorong negara-negara bekerjasama melawan serangan teroris melalui pembagian informasi dan bantuan dalam jaringan investigasi dan ekstradisi kriminal. Perjanjian ini mensyaratkan agar setiap material nuklir atau radioaktif yang tertangkap dapat berhubungan dengan IAEA agar sesuai dengan standar kesehatan, keamanan, dan keselamatan fisik.

6. *New Strategic Arms Reduction Treaty* (New START) (2010)

Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms adalah nama resmi perjanjian ini. Ditandatangani pada 8 April 2010 di Prague membuat perjanjian ini juga dikenal dengan istilah *Treaty of Prague*. Penyebutan New START sebenarnya mengacu kepada penamaan beberapa perjanjian-perjanjian yang mendahuluinya, seperti SALT I dan II dan START I, II, III. Perjanjian ini termasuk perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Rusia yang membahas pengurangan senjata strategis, seperti nuklir dan kendaraan pengangkutnya. Setelah mendapatkan ratifikasi masing-masing negara, New START memasuki aktif pada 5 Februari 2011.

Terdapat tiga pembatasan utama dalam perjanjian ini, yaitu:

- a. Hulu ledak yang terpasang di ICBM ataupun SLBM masing-masing negara harus berjumlah 1.550 hulu ledak dalam waktu 7 tahun setelah perjanjian diratifikasi.
- b. Kendaraan peluncur nuklir, baik dengan nuklir yang masih terpasang atau belum, masing-masing negara harus berjumlah 800 unit.
- c. Kendaraan peluncur dengan nuklir yang telah terpasang di masing-masing negara harus berjumlah 700 unit.

Perjanjian ini tidak hanya membahas batasan jumlah bagi senjata nuklir, tapi juga pembahasan tambahan bahwa setiap negara memiliki fleksibilitas dalam menentukan struktur kekuatan strategis negaranya selama sesuai dengan jumlah agregat dalam perjanjian ini. Hal lain yang tidak disinggung dalam perjanjian ini adalah larangan uji coba, pengembangan atau pemasangan program pertahanan peluru kendali Amerika Serikat.

Perjanjian ini memiliki kronologi verifikasi yang mendetail yang menggabungkan tata cara seperti pada START 1991 dengan tambahan-tambahan. Langkah-langkah tersebut misalnya inspeksi langsung dan pameran perlengkapan, pertukaran data dan pemberitahuan senjata strategis dan fasilitasnya, dan ketentuan untuk menggunakan kekuatan teknis nasional untuk mengawasi perjanjian ini. Pertukaran telemetri juga dilakukan demi meningkatkan kepercayaan dan transparansi. Dalam waktu 10 tahun perjanjian ini akan habis masa berlakunya jika semua dalam keadaan lancar. Bahkan dalam batasan-batasan perjanjian nuklir disepakati bahwa tidak menutup kemungkinan akan terdapat penambahan jangka waktu hingga 5 tahun jika kedua negara menyetujuinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Amerika Serikat dan Rusia adalah dua negara besar yang berhasil mempertahankan pengaruhnya sebagai negara pemilik kekuatan nuklir terbesar dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan hegemoni kedua negara ini dalam lingkungan internasional. Kepemilikan nuklir telah membuat kedua negara ini menjadi pusat dari penyusunan kebijakan negara-negara pemilik nuklir maupun yang bukan. Kedua negara yang menyadari hal itu kemudian melalui pemimpinnya menyusun kepentingan nasional dan kebijakan luar negerinya untuk mewadahi pengaruh ini.

Amerika Serikat melalui *National Security Strategy*-nya dan Rusia melalui atau Strategi Pertahanan Nasional memberikan ruang khusus dalam penjelasan kepentingan nasional mereka untuk membahas terkait nuklir dan berbagai variabel ancaman dan kerjasama yang mengikutinya. Amerika Serikat menekankan pentingnya posisi mereka sebagai pemimpin dunia dalam kebijakan nuklir internasional. Rusia menjelaskan kekuatan mereka sebagai pemain utama dunia, khususnya di kawasan perbatasan dengan negara lain.

Penandatanganan perjanjian New START adalah implementasi kebijakan luar negeri, terkait nuklir kedua negara untuk bersama-sama mengurangi ancaman nuklir dari pihak-pihak non-pemerintah, seperti teroris. Perjanjian ini juga menjadi pintu bagi kedua negara untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan nuklir masing-masing. Tidak dapat dinafikan bahwa kedua negara juga menggunakan perjanjian ini untuk memodernisasi kekuatan nuklir mereka agar lebih efisien dan efektif. Meskipun demikian, hal ini masih dapat ditolerir mengingat yang penting sekarang adalah bagaimana mengurangi jumlahnya dulu agar tidak menjadi ancaman bagi negara lain atau yang terburuk jatuh ke tangan pihak non-negara. Ketakutan

kedua negara terhadap terorisme nuklir beralasan setelah terbongkarnya jaringan bawah tanah penyelundupan besar-besaran nuklir ke Libya dan Korea Utara oleh A. Q. Khan. Ini jugalah yang menjadi alasan kedua negara secara khusus memasukkan ini sebagai bagian dari pertahanan nasional mereka.

Perjanjian New START bukanlah perjanjian pertama yang membatasi dan mengurangi persenjataan kedua negara. Selain SALT juga terdapat START yang berhasil mereduksi jumlah nuklir masing-masing negara. Belajar dari pengalaman diplomasi nuklir kedua negara, Amerika Serikat dan Rusia memiliki pengalaman yang cukup untuk menyiapkan dan menciptakan sistem pengawasan dan inspeksi yang baik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan pendataan dan miskomunikasi yang bisa saja berdampak seperti tidak terdatanya beberapa nuklir sisa Perang Dingin.

Jumlah nuklir yang melebihi kebutuhan memberikan dampak negatif dari segi ekonomi, khususnya efisiensi pertahanan suatu negara. Nuklir adalah senjata yang terus dirawat sejak diciptakan dalam Perang Dingin, namun tidak pernah sekalipun digunakan dalam perang konvensional. Tidak heran pengeluaran Amerika Serikat dalam bidang pertahanan tersedot cukup banyak untuk anggaran perawatan senjata nuklir mereka. Sementara Rusia, beberapa ahli berpendapat nuklir mereka ikut menjadi faktor kebangkrutan ekonomi Uni Soviet. Kondisi-kondisi inilah yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perjanjian ini.

B. Saran

New START menjadi salah satu perjanjian yang berhasil mempengaruhi jumlah persenjataan nuklir Amerika Serikat dan Rusia. Selain dari dalam negeri, diperlukan ketegasan dari pihak-pihak luar untuk ikut membantu dan menekan agar perjanjian ini tidak melenceng dari tujuan awalnya. New START juga telah berhasil membuka data jumlah persenjataan nuklir Rusia yang diharapkan bisa terus terbuka seperti halnya Amerika Serikat.

Sehingga negara-negara dan pihak-pihak lain dapat membantu dalam memonitor jumlah dan pergerakan senjata nuklir ini. Berkurangnya jumlah senjata nuklir yang beredar, ikutnya negara-negara dan pihak non-pemerintah dalam memonitor, dan kekuatan negara besar yang akan menjaga nuklir untuk tidak digunakan secara salah oleh pihak-pihak tertentu.

Diharapkan terikatnya kedua negara dalam perjanjian ini akan ikut mempengaruhi negara-negara lain untuk menghilangkan hasratnya memiliki kekuatan nuklir selain untuk tujuan damai, dan bagi negara-negara yang telah memiliki nuklir agar ikut mengurangi kepemilikan mereka, sehingga ancaman dari senjata nuklir akan terus berkurang. Ditambah dengan konsistensi kedua negara, bukan tidak mungkin perjanjian ini akan dilanjutkan atau bahkan akan ada perjanjian-perjanjian lainnya yang mengatur kepemilikan senjata nuklir. Maka pada akhirnya dunia akan hidup dalam kondisi kerjasama bukan lagi ancaman.